

e-news letter

JUNI II 2020

# PKSPARLEMEN

KREATIF, INOVATIF, SUBSTANTIF

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



Habib Aboe Bakar Alhabsyi

## APRESIASI MUI MENOLAK RUU HIP

Yang Dinilai Mendistorsi  
Makna Pancasila



# RUU HIP Yang Ambyar, Covid Terbesar

Indonesia saat ini menghadapi dilema terbesar, sudah jatuh tertimpa tangga. Saat masih dihempas wabah covid 19 yang angkanya makin naik, pada saat yang bersamaan ada Rancangan Undang-Undang yang menandai kontroversi dan menggoreng luka sejarah. Awalnya diajak untuk kembali ke Haluan dengan baik-baik, namun bersikeras karena merasa punya otoritas dan kewenangan 'palu sidang' untuk mengesahkan. Akhirnya kini menandai reaksi dan menggelinding menjadi protes yang besar.

Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) isinya hambar dan ambyar karena dibangun dengan narasi yang kehilangan ruh dan tujuan dasar falsafah bernegara. Ibarat sayur tanpa garam, bagai raga tanpa cinta. Isinya ada macam dan rupa yang mencoba mereduksi esensi yang sebenarnya dari Pancasila.

Ada pasal yang mendorong Pancasila diperas menjadi ekasila dan trisila, hingga akhirnya hanya gotong royong. Kemudian ada pasal yang menuliskan ketuhanan yang berkebudayaan. Macam-macam

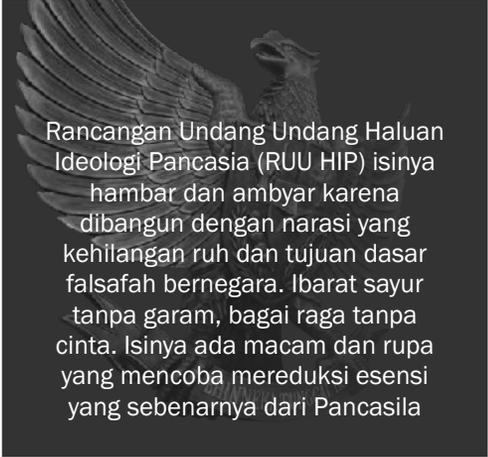
diksi dijejali untuk me-redefinisi dan mereduksi Pancasila. Nampak elok, namun sejatinya menandai cela dan membuka luka sejarah panjang. Saat kita butuh persatuan dan mengambil saripati kebaikan dari nilai yang hidup di bangsa Indonesia, malah ada yang sibuk mempertentangkan ketuhanan dengan kebangsaan lewat regulasi. Kebangsetan!

Rumitnya dalam proses pengisian nilai-nilai yang mendasari RUU HIP para pengusul nampak berat dan menolak keras memasukkan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 Tahun 1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, pernyataan sebagai organisasi terlarang diseluruh wilayah negara republik indonesia bagi partai komunis indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran komunis/marxisme-leninisme. Padahal ada banyak TAP MPR yang sejenis masuk, tentu pada akhirnya menandai curiga dan memantik reaksi publik secara luas. Jika sudah seperti ini maka munculkan Pancasila tanpa solusi, menunda. Hingga kemudian reda dan

lupa, kemudian secara tiba-tiba sudah ada di lembaran negara. Waspada nan jaga menjadi penting, karena dari Pancasila kita belajar hidup bersama menerima apa yang ada sebagai potensi.

Epik yang lain, dada kita semakin sesak saat melihat data terbaru Worldometer yang menunjukkan Indonesia menjadi negara dengan jumlah kasus Covid 19 terbanyak di ASEAN. Sebagaimana situasi serupa terjadi dengan India karena jadi yang terbanyak di Asia. Capaian angka yang sudah terduga dan diprediksi oleh ahli epidemiologi jika penerapan kebijakan New Normal yang tidak matang. Serba tanggung dan setengah-setengah, tidak matang terlanjur mentah. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekedar etaslase kebijakan check point bukan entry point penyelesaian.

Pemerintah tidak pernah mengangap ada gelombang dua penyebaran Covid 19, karena sesungguhnya tidak pernah berhasil menurunkan kurva di gelombang pertama. Malah info berita terbaru Presiden Jokowi siap 'blusukan' Kembali di zona hijau. Proyek -



Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) isinya hambar dan ambyar karena dibangun dengan narasi yang kehilangan ruh dan tujuan dasar falsafah bernegara. Ibarat sayur tanpa garam, bagai raga tanpa cinta. Isinya ada macam dan rupa yang mencoba mereduksi esensi yang sebenarnya dari Pancasila

proyek ambisius minim anggaran dan gagasan digesa terus. Tentu saja pesan ini teresonansi dengan sangat kencang ke akar rumput, sebagai pertanda bahwa semua baik-baik saja. Tidak ada masalah. Lalu berhamburan semua keluar, dipasar dan ditempat kerumunan. Selepas itu bermunculan kabar pilu menghampir ruang informasi kita bahwa di acara 'kondangan' ada bayi yang tertular dan ada pasar yang ditutup karena para pedagang positif.

Kita jadi mengernyitkan dahi, karena angka meninggal sampai dengan tanggal 17 Juni 2020 sebanyak 2.276 dengan

jumlah total kasus 41.431 orang. Kami ingatkan untuk kesekian kali : Indonesia merupakan negara dengan jumlah kasus positif terbanyak dan kasus kematian akibat virus corona merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN lainnya.

Mau sampai kapan semua ini terjadi ? tentu kesadaran tidak perlu menunggu situasi orang mengelepar tiba-tiba dijalankan dan ideologi anti Pancasila mendesis di semua sendi kehidupan bangsa.



Jika Tidak Ada  
Perbaikan Fundamental

# Fraksi PKS Minta RUU HIP DIBATALKAN

**1** Memasukkan TAP MPRS XXV/MPRS/1966 sebagai konsideran yang menjiwai RUU untuk menegaskan bahwa Pancasila tegas menolak seluruh ajaran komunisme, marxisme, dan leninisme yang memang ajarannya bertentangan dengan Pancasila. PKI sendiri terbukti telah merongrong kewibawaan Pancasila dan berkhianat pada republik.

**2** Menolak Pancasila diperas menjadi trisila dan ekasila. Ketentuan tersebut dalam draf RUU HIP harus dihapus karena dapat mereduksi makna Pancasila yang utuh dengan lima silanya, tegasnya.

**3** Ketuhanan Yang Maha Esa harus tegas ditempatkan sebagai sila utama yang melandasi, menjiwai, dan menyinari sila-sila lainnya. Hal itu harus tercermin secara maksimal dalam materi muatan draf RUU HIP, bersama penjabaran sila-sila lainnya.



Fraksi PKS satu-satunya Fraksi yang sejak awal tegas bersikap soal RUU ini. Kami mempelajari dengan cermat Naskah Akademik maupun pasal-pasal RUU dan menyimpulkan bahwa RUU bermasalah secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Konstruksinya mengarah pada reduksi makna sila-sila Pancasila yang utuh yang disepakati dan termaktub dalam Pembukaan UUD 1945

**Dr. H. Jazuli Juwaini, MA**  
Ketua Fraksi PKS DPR RI





# Fraksi PKS : Respon Luas Atas RUU HIP Bukti Tanggung Jawab Bersama Jaga Pancasila

Kami di PKS berbesar hati, mendukung penuh dan mengapresiasi respon masyarakat dan kalangan ormas, seperti NU, Muhammadiyah, hingga MUI yang memberi respon kritis dan konstruktif atau RUU HIP yang sejalan dengan sikap dan pandangan politik Fraksi PKS

## Dr. H. JAZULI JUWAINI, MA

Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (14/6) - Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengapresiasi respon publik, fraksi-fraksi DPR, kalangan purnawarawan TNI, bahkan pemerintah yang sangat hati-hati dan cermat atas usul inisiatif RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang belum lama diputuskan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Ini membuktikan tanggung jawab bersama untuk menjaga Pancasila.

"Kami di PKS berbesar hati, mendukung penuh dan mengapresiasi respon masyarakat dan kalangan ormas, seperti NU, Muhammadiyah, hingga MUI yang memberi respon kritis dan konstruktif atau RUU HIP yang sejalan dengan sikap dan

pandangan politik Fraksi PKS," ungkap Jazuli.

Bahkan, Pemerintah melalui pernyataan Menkopohukam Mahfud MD, juga menekankan jika sauatnya tiba terlibat dalam pembahasan, pemerintah akan mengusulkan TAP MPRS XXV/1966 untuk dimasukkan menjadi RUU Usul Inisiatif DPR. Ini membuktikan tanggung jawab bersama untuk menjaga Pancasila.

"Ini pertanda bahwa upaya mengokohkan Pancasila dan menjaga nilai-nilainya agar tetap murni dan konsekuen menjadi perhatian, kepedulian, dan tanggung jawab kita bersama. Sehingga ketika ada arah yang salah kita kritis dan benarkan secara bersama-

sama," tandas Jazuli.

### Menguatkan Sikap Fraksi PKS

Ketua Fraksi PKS DPR RI ini mengatakan, Fraksi PKS sejak awal tegas meminta dicantumkan TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI serta ajaran komunisme, marxisme dan leninisme. Bahkan ketika draf RUU akhirnya tidak juga mencantumkan TAP MPRS tersebut, Fraksi PKS menjadi satu-satunya Fraksi yang menyampaikan penolakan secara resmi dalam pandangan Fraksi.

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, juga meminta dengan tegas agar penjabaran Pancasila dalam draf RUU benar-benar merujuk dan tidak menyimpangi sejarah dan original intent-nya yang benar. Menurutnya, Pancasila yang akhirnya disepakati sebagai platform bersama dan titik temu kebangsaan Indonesia adalah yang terdiri dari lima sila.

"Maka RUU HIP harus mencerminkan keseluruhan silanya yang lima. Jangan direduksi lagi menjadi apakah trisila atau ekasila. Jika hal itu dilakukan akan set back, Pancasila akan tereduksi pada tafsir sepihak bahkan tafsir



tanggung oleh kelompok tertentu yang kontraproduktif dalam upaya mengokohkan Pancasila itu sendiri," tegasnya.

Akibat upaya reduksi Pancasila menjadi trisila atau ekasila, kita bisa kehilangan makna atau ketertarikan sila-sila Pancasila yang lima, yang merupakan final kesepakatan sebagai dasar negara kita. Anggota Komisi I DPR ini memberi contoh, rakyat bisa bias bahkan bisa salah paham terkait sejarah dan original intent sila pertama Ketuhanan

Yang Maha Esa karena ditempatkan pertama, karena ialah sila utama, bintang penerang, yang menjwai dan menyinari sila-sila lainnya.

"Jika kita baca RUU HIP pemaknaan dan penempatan sila pertama tidak proporsional bahkan sangat minimalis, padahal posisi dan kedudukannya—merujuk risalah tentang Pancasila—sangat penting dan utama," terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Dinilai Mendistorsi Makna Pancasila

# Habib Aboe Apresiasi MUI yang Menolak RUU HIP

Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, suara para Ulama sejalan dengan suara PKS. Tentunya ini akan menambah spirit untuk kami, ini menjadi energi tambahan untuk lebih lantang menyuarakan pelarangan komunisme di Indonesia, utamanya dalam RUU HIP

## HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (14/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Aboe Bakar Al-Habsy merespon dukungan sejumlah pihak termasuk elemen Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat hingga daerah, terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang tak memuat TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan PKI serta ajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

Menurut Bendahara Fraksi PKS DPR RI ini, PKS sangat mengapresiasi maklumat Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan Provinsi No Nomor : Kep-1240/DP-MUI/VI/2020.

"Pada pokok pikirannya,

para Ulama di MUI menyampaikan bahwa RUU HIP telah mendistorsi substansi dan makna nilai-nilai Pancasila, sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan dan Batang Tubuh UUD Tahun 1945," ungkap pria yang akrab disapa Habib Aboe ini.

Sebenarnya, lanjut Habib Aboe, penolakan ini sangat sejalan dengan kekhawatiran PKS selama ini, karenanya PKS keukeuh menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP.

"Alhamdulillah, kami sangat bersyukur, suara para Ulama sejalan dengan suara PKS. Tentunya ini akan menambah spirit untuk kami, ini menja-

di energi tambahan untuk lebih lantang menyuarakan pelarangan komunisme di Indonesia, utamanya dalam RUU HIP," tandasnya.

Bagi PKS, katanya, Pancasila adalah nilai mati, kita bersama Ulama akan mengawal Pancasila sebagai ideologi bangsa. Dan tentunya kita tidak ingin mengulang sejarah, ketika para Ulama kita dibantai oleh PKI.

"Oleh karenanya jika ada RUU HIP, sudah menjadi kewajiban kita memasukkan TAP MPRS No. XXV/MPRS/1966 sebagai salah satu sumber rujukan", tutup Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan ini.



## Menyikapi Permintaan Pemerintah Kepada DPR Soal RUU HIP

# HNW: Jika Bisa Dihentikan Buat Apa Ditunda

Purnawirawan TNI/Polri yang menolak ada pak Tri Sutrisno yang juga wakil ketua Dewan Pengarah BPIP, juga para Pakar seperti pak Yudi Latif (mantan Ketua BPIP), serta Ormas-ormas Keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU bersama seluruh Ormas Islam yang lain termasuk Hidayatullah dan lainnya, yang sudah menyampaikan sikapnya, agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP,"

### **Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (17/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid merespon sikap Pemerintah yang meminta DPR untuk menunda pembahasan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai protes di masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI ini

menyatakan pada prinsipnya DPR menyambut sikap Pemerintah.

"Tapi kalau arahnya agar DPR menunda bahas RUU HIP untuk banyak serap aspirasi masyarakat, maka mestinya Pemerintah tidak hanya meminta ditunda, tapi

dihentikan saja pembahasan RUU HIP," tegas pria yang akrab disapa HNW.

HNW menambahkan, penghentian pembahasan RUU HIP perlu dilakukan, karena itulah yang sudah disampaikan berbagai kelompok masyarakat seperti Purnawirawan TNI/Polri.

"Purnawirawan TNI/Polri yang menolak ada pak Tri Sutrisno yang juga wakil ketua Dewan Pengarah BPIP, juga para Pakar seperti pak Yudi Latif (mantan Ketua BPIP), serta Ormas-ormas Keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU bersama seluruh Ormas Islam yang lain termasuk Hidayatullah dan lainnya, yang sudah menyampaikan sikapnya, agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP," terang Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

HNW melanjutkan mestinya pimpinan Baleg dan DPR yang tidak ada dari pihak Oposisi, bisa segera melaksanakan harapan



Pemerintah itu.

"Sebagaimana sebelumnya DPR bisa laksanakan permintaan Pemerintah untuk tunda pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker, maka sekarang mestinya juga bisa laksanakan permintaan Pemerintah itu," tegasnya.

Tapi, kata Hidayat, Pemerintah juga perlu diingatkan sesungguhnya tidak semua DPR setuju untuk

membahas RUU HIP. Dua Fraksi yakni Fraksi PKS dan Fraksi PD tidak ikut menandatangani usulan RUU tersebut menjadi RUU Inisiatif DPR.

"Dalam Rapat Paripurna itu Fraksi PKS juga tegas menyampaikan sikap resminya yang menolak (pembahasan) RUU HIP," tutup HNW mengakhiri.



RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP)

# Jika Bisa Dihentikan Buat Apa Ditunda

“

Purnawirawan TNI/Polri yang menolak ada pak Tri Sutrisno yang juga wakil ketua Dewan Pengarah BPIP, juga para Pakar seperti pak Yudi Latif (mantan Ketua BPIP), serta Ormas-ormas Keagamaan seperti MUI, Muhammadiyah, NU bersama seluruh Ormas Islam yang lain termasuk Hidayatullah dan lainnya, yang sudah sampaikan sikapnya, agar RUU itu dihentikan pembahasannya karena permasalahan mendasar yang ada dalam RUU HIP



**Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A**

Wakil Ketua MPR RI

## Laut Cina Selatan Memanas,

# Sukamta: Pastikan Kedaulatan Wilayah Indonesia Aman

Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia

## H. SUKAMTA, Ph.D

Anggota Komisi I DPR RI

Yogyakarta (12/06) — Peningkatan eskalasi di Laut Cina Selatan (LCS) akibat saling reaksi antara militer Cina dan Amerika Serikat (AS) dalam beberapa pekan terakhir, menurut Anggota Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Sukamta, perlu menjadi perhatian serius Pemerintah.

Hal ini mengingat wilayah Indonesia memiliki perbatasan langsung dengan LCS dan beberapa kali terjadi insiden kapal-kapal nelayan dengan kawalan cost guard Cina masuk ke Laut Natuna Utara yang

masuk wilayah Indonesia.

"Kedaulatan wilayah Indonesia harus jadi prioritas paling utama untuk diamankan. Pemerintah melalui Panglima TNI perlu kerahkan kapal perang dan pesawat pengintai di Laut Natuna Utara untuk mengantisipasi terulangnya kembali pelanggaran oleh kapal-kapal asing ke wilayah Indonesia. Reaksi yang kuat dari pemerintah akan jadi sinyal bagi Cina dan negara manapun untuk tidak coba-coba secara ilegal masuk wilayah Indonesia," tegas Sukamta.

Menurut Wakil Ketua Fraksi PKS ini, Indonesia tidak perlu masuk ke dalam arena konflik antara Cina dan AS karena politik luar negara Indonesia yang bebas aktif selalu mengarah kepada upaya perdamaian dunia. Selain itu Indonesia punya hubungan diplomatik yang baik dengan kedua negara.

"Fokus kita hanya amankan wilayah Indonesia. Pedoman kita atas wilayah laut adalah keputusan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB. Termasuk wilayah Indonesia adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE) yaitu kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, dalam hal ini Natuna. Cina sebagai bagian dari UNCLOS, harus menghormati keputusan ini," papar Sukamta.

Untuk itu Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS ini berharap selain menjaga wilayah Indonesia dengan kekuatan TNI, pemerintah juga perlu terus memperkuat



diplomasi internasional dan kerjasama khususnya dengan negara-negara ASEAN yang sejauh ini juga merasa dirugikan oleh klaim secara sepihak Cina atas LCS.

"ASEAN harus bersatu menolak klaim Cina atas LCS dan perlu ada langkah-langkah efektif untuk melindungi kepentingan ASEAN di wilayah

ini. Bersatunya ASEAN tentu akan memberikan tekanan tersendiri kepada Beijing untuk tidak umbar kekuatan dan juga untuk memastikan Cina mau menerima norma-norma internasional dan Putusan Pengadilan Arbitrase tahun 2016 yang telah memantapkan klaim historis atas LCS," tutup Sukamta.

# Legislator PKS Minta Investigasi Menyeluruh Jatuhnya Helikopter MI-17 TNI AD

Bulan Juli 2019 Helikopter MI-17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua dan kemarin di Kendal Jawa Tengah ini jelas harus dilakukan investigasi menyeluruh dan serius karena TNI Kita banyak pakai Heli jenis ini

## **Dr. ABDUL KHARIS A, SE. M.Si.Akt**

Wakil Ketua Komisi I DPR RI

Solo (07/06) — Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI dari Fraksi PKS, Abdul Kharis Almayshari, menyampaikan duka mendalam atas kecelakaan yang dialami Helikopter MI 17 HA 5141 milik Penerbang TNI AD (Penerbang) yang mengantuk sembilan personel TNI dan sebanyak empat personel TNI AD gugur dan lima lainnya luka.

"Saya sampaikan duka mendalam kepada keluarga prajurit yang gugur dan terluka, Helikopter tersebut sedang melaksanakan misi latihan terbang di Pusat Pendidikan Penerbang AD, Semarang, Jawa Tengah, sebagai bagian dari program Pendidikan Calon Perwira dan itu merupakan tugas negara, semoga Keluarga

yang ditinggalkan diberikan ketabahan, kekuatan dan keikhlasan" jelas Kharis dalam keterangan tertulis Ahad, (07/06).

Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini menambahkan kecelakaan helikopter jenis ini merupakan yang kedua kalinya, setelah tahun lalu jatuh di Papua, karena itu Kharis meminta adanya investigasi menyeluruh dan agar secepatnya Kementerian Pertahanan dan Panglima TNI memberikan laporan lengkapnya kepada DPR RI khususnya Komisi 1 DPR RI.

"Bulan Juli 2019 Helikopter MI-17 Milik TNI AD juga jatuh di Papua dan kemarin di Kendal Jawa Tengah ini jelas harus dilakukan investigasi

menyeluruh dan serius karena TNI Kita banyak pakai Heli jenis ini" tegas Kharis.

Helikopter MI-17 merupakan buatan Rusia dan sebagai heli angkut milik TNI AD yang paling banyak dipakai dalam misi latihan maupun misi pengiriman logistik dan pasukan, selain itu, MI-17 tidak hanya untuk operasi militer, tapi ia kerap turun dalam operasi SAR atau menjangkau daerah-daerah terpencil di Tanah Air.

"Saya mohon kepada Panglima TNI mengingat rentan dan pentingnya Alutsista TNI agar menambahkan biaya pemeliharaan dan perawatan Alutsista jangan sampai ada yg kurang sedikitpun dan semoga tidak ada kecelakaan lagi kedepan" tutup Kharis



## Pilkada Serentak 2020

# Anggota FPKS: Protokol Kesehatan dan Partisipasi Pemilih Jadi PR KPU

Menurut saya ini adalah sejarah baru, pilkada di masa pandemi, kampanye di masa pandemi. Selain harus memenuhi protokol kesehatan covid 19, calon kandidat yang mengikuti pilkada pun dituntut untuk menyosialisasikan dirinya dan meyakinkan pemilih dengan ruang-ruang yang lebih dibatasi jadi tidak bisa kampanye seperti yang lalu

### **TEDDY SETIADI, S.Sos.**

Anggota Komisi II DPR RI

Bandung (17/06) — Komisi Pemilihan umum (KPU) tengah melakukan persiapan menjelang pelaksanaan pilkada serentak yang diagendakan pada 9 Desember 2020.

Rencannya KPU akan menggelar simulasi pilkada sesuai protokol Covid-19 pada Juli mendatang.

Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PKS, Teddy Setiadi, mendukung penuh upaya KPU untuk menyiapkan pilkada serentak dengan menggunakan protokol Covid - 19.

"Kita tahu, pandemi covid-19 ini belum berakhir, jumlah peningkatan kasus positif juga semakin meningkat bersamaan

dengan jumlah yang mengikuti tes yang bertambah banyak. Oleh karena itu, protokol covid-19 harus tetap dijalankan, jangan sampai timbul klaster-klaster baru berupa klaster tps." Ujar Teddy saat koordinasi relawan teddy setiadi (Ready).

Selain menjalankan protokol Covid-19, KPU juga memiliki pekerjaan rumah yang lain, yakni mengenai tingkat partisipasi pemilih.

"Dengan adanya pandemi covid 19 ini, tingkat partisipasi pemilih kemungkinan menurun karena kekhawatiran warga akan pandemi covid-19 dan juga kesibukan masing-masing warga dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya akibat pengurangan penghasilan hingga pemutusan hubungan kerja (phk)," ungkap Teddy.

"Menurut saya ini adalah sejarah baru, pilkada di masa pandemi, kampanye di masa



pandemi. Selain harus memenuhi protokol kesehatan covid 19, calon kandidat yang mengikuti pilkada pun dituntut untuk menyosialisasikan dirinya dan meyakinkan pemilih dengan ruang-ruang yang lebih dibatasi jadi tidak bisa kampanye seperti yang lalu," ujar Teddy

"Harapannya pilkada 9 Desember nanti bisa berjalan

lancar, kampanye tetap efektif, partisipasi pemilih tinggi, dan para pemilih tetap sehat, sehingga pemimpin yang terpilih betul-betul berkualitas dan masyarakat tetap aman tidak terpapar covid-19." Tutup Teddy

## Tanggapi Hukuman Penyerang Novel Baswedan

# Habib Aboe: Mengoyak Rasa Keadilan Masyarakat!

Mendengar tuntutan 1 tahun untuk penyerang Novel dengan alasan tidak sengaja melukai mata, ini sangat mengoyak rasa keadilan masyarakat. Seolah tindakan para penyerang Novel ini dapat dimaklumi dengan alasan ketidaksengajaan

### **HABIB ABOE BAKAR ALHABSYI**

Anggota Komisi III DPR RI

Jakarta (12/06) — Anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Alhabsyi, langsung merespon tuntutan hukuman 1 tahun penjara, bagi penyerang penyidik KPK, Novel Baswedan.

"Mendengar tuntutan 1 tahun untuk penyerang Novel dengan alasan tidak sengaja melukai mata, ini sangat mengoyak rasa keadilan masyarakat. Seolah tindakan para penyerang Novel ini dapat dimaklumi dengan alasan ketidaksengajaan," tandas Bendahara Fraksi PKS ini.

Pria yang akrab disapa Habib Aboe ini mengatakan bahwa yang perlu diingat dalam teori ilmu hukum pidana dikatakan 'tiada pidana tanpa kesalahan' (*geen straf zonder schuld*).

"Kesalahan disini dapat berupa dua dimensi faset, yakni pidana kesalahan akibat 'ketidaksengajaan' (dolus) dan pidana kesalahan akibat 'kelalaian'. Jadi jika dikatakan tindakan penyiraman ini tak sengaja, seolah ingin menghilangkan unsur dolus dalam pidana", terang Habib Aboe.

Seharusnya, lanjut Habib Aboe, yang menjadi unsur penebatu disini adalah faktor niat batin (mens rea) dari para pelaku.

"Apa memang ada penyiraman air keras dikakukan dengan tanpa sengaja? Inikan bahasa sangat sederhana, masak ada istilah "menyiram" tanpa sengaja. Para pelaku yang membawa air keras, pada suatu subuh dengan mentarget

Novel, adalah indikasi kuat mens rea mereka. Bahwa secara sadar mereka melakukan perbuatan penyerangan terhadap Novel dengan alat air keras", paparnya.

Inilah, katanya, yang terlihat mengoyak rasa keadilan masyarakat. Perkara yang sedang menjadi perhatian publik seperti ini seharusnya ditangani dengan baik.

"Kejaksanaan seharusnya menyiapkan rencana penuntutan yang baik, jangan sampai seolah publik melihat ini hanya sebuah drama. Hal ini tidak baik untuk citra penegakan hukum di Indonesia," pungkasnya.

Menurutnya, Jamwas dan Jaksa Agung perlu memberikan atensi pada kasus ini.

"Publik berhak tahu kenapa tuntutan kepada pelaku penyerangan penegak hukum bisa seperti itu. Jangan sampai nanti menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia," tegasnya mengakhiri.



## Soal Polemik RUU HIP

# Ini Sikap Anggota Komisi III DPR Dimiyati Natakusumah

“Kita (F-PKS,-red) menolak karena secara prosedural dalam membahas hal atau sesuatu yang fundamental yaitu dasar negara tetapi di dalam kondisi pandemi yang tidak efektif sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan konsultasi publik dan kajian-kajian bersama para pakar (ahli hukum)

**DR. H. R. DIMIYATI NATAKUSUMAH, SH, MH**

Anggota Komisi III DPR RI

Pandeglang (17/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dimiyati Natakusumah menanggapi Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang kini menjadi sorotan dan menuai polemik.

“RUU HIP ini banyak secara konten tidak sesuai karena ada wacana perubahan pancasila Menestrisila atau ekasila. Selain itu, perubahan makna ketuhanan pun patut dipersoalkan.” tandas Dimiyati saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/06/2020) di Pandeglang.

Dimiyati suami dari Bupati Pandeglang ini, saat ditanya banyak kritik yang muncul dari

berbagai elemen masyarakat yang menyebut Pembahasan RUU HIP terkesan tertutup dan buru-buru di masa pandemi Covid-19 ini.

“Kita (F-PKS,-red) menolak karena secara prosedural dalam membahas hal atau sesuatu yang fundamental yaitu dasar negara tetapi di dalam kondisi pandemi yang tidak efektif sehingga kita tidak punya waktu untuk melakukan konsultasi publik dan kajian-kajian bersama para pakar (ahli hukum).” beber Dimiyati.

Apakah pembahasan RUU HIP melibatkan berbagai elemen masyarakat, dikatakan

Dimiyati, bahwa justru kalau melibatkan seluruh elemen masyarakat kegaduhan ini tidak akan terjadi.

“Artinya dalam pembahasan RUU ini kita menyerap aspirasi dan pendapat dari publik selanjutnya kita bahas di DPR. Sekarang kan terjadi penolakan dari berbagai elemen masyarakat karena kesanya ini terburu buru, bahaya sekali ini, apalagi ini membahas yang fundamental.” tegasnya.

Dikatakannya, yang mendasari dilakukannya pembahasan RUU HIP yaitu Pancasila sebagai ideologi tak seharusnya dibahas lagi.

“Dengan demikian RUU HIP sebetulnya tak perlu lagi dibahas karena akhirnya hanya akan membikin gaduh. Secara ideologi, bangsa Indonesia ini sudah selesai, jangan dibawa lagi ke pertarungan ideologi.” kata Dimiyati

Lebih lanjut Dimiyati mengatakan, ada substansi draf RUU HIP yang masih perlu diperdebatkan, diantaranya Kesalahan pertama penyusunan RUU HIP adalah menggunakan rangkaian kata-



kata “Ideologi Pancasila.” Dalam Empat Pilar MPR dinyatakannya bahwa Pancasila adalah Ideologi Negara. Dengan demikian menulis Ideologi Pancasila adalah suatu pengulangan sehingga menjadi “Haluan Ideologi Pancasila

Kesalahan kedua, dan yang paling salah adalah membuat Undang-Undang untuk Pancasila. Sesuai dengan UU No. 12 tahun 2011, semua Undang-Undang letaknya di bawah Pancasila. Tidak ada dasar hukum di atas Pancasila yang dapat memberi legitimasi membuat Undang-Undang untuk Pancasila. Oleh karena itu, pemikiran yang sangat aneh akan membuat Undang-Undang untuk sumber segala sumber hukum negara Indonesia. Ini

suatu kesalahan logika berpikir lagi. Oleh karena itu, sebaiknya pembahasan RUU HIP dibatalkan.

“Jika pembahasan RUU HIP dilanjutkan maka Fraksi PKS meminta agar TAP MPRS XXV/MPRS/1966 dimasukkan sebagai konsideran dalam RUU HIP. Kemudian Fraksi PKS juga menolak agar Pancasila diperas menjadi trisila dan ekasila. Terakhir, sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus tegas ditempatkan sebagai sila utama yang melandasi, menjiwa, dan menyinari sila lainnya.” ujarnya, seraya menambahkan bahwa jika usulan Fraksi PKS yang juga menjadi aspirasi masyarakat tersebut tidak diakomodir maka lebih baik draf RUU HIP ditarik kembali atau dibatalkan.

# Anggota FPKS Dorong Pemerintah Untuk Majukan Daerah Potensi Agrowisata

Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan agrowisata karena dianugerahkan keindahan alam yang sangat luar biasa, banyaknya komoditas tanaman dan hasil produksi yang beragam. Saya akan mendorong pemerintah melalui jalur komisi dimana menteri pertanian, menteri kehutanan lingkungan hidup dan menteri kelautan perikanan sebagai mitra komisi IV

**Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P.,M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Jakarta (09/06) — Pasca wabah Covid-19 ke depan, Pemerintah haruslah mempersiapkan berbagai hal termasuk sektor pertanian sebagai salah satu pondasi ketahanan bangsa.

Pada sektor pertanian selain persoalan produksi, ada potensi nilai tambah yang hingga saat ini masih minim dikembangkan terutama agrowisata. Hal ini dikatakan oleh Andi Akmal Pasluddin, Anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi PKS.

"Indonesia memiliki potensi besar untuk memajukan agrowisata karena dianugerahkan

keindahan alam yang sangat luar biasa, banyaknya komoditas tanaman dan hasil produksi yang beragam. Saya akan mendorong pemerintah melalui jalur komisi dimana menteri pertanian, menteri kehutanan lingkungan hidup dan menteri kelautan perikanan sebagai mitra komisi IV", kata politisi PKS ini.

Terlebih pada dunia pertanian Indonesia yang luas dan beragam, beberapa daerah di Indonesia memiliki potensi agrowisata yang bisa dikembangkan.

"Di seluruh Indonesia disetiap provinsi pasti ada daerah-daerah tertentu (potensi agrowisata), saya kira bisa menjadi salah satu destinasi wisata yang berbasis pertanian, seperti pertanian berbasis organik. Saya kira dengan pandemi Covid-19 ini, ke depannya itu masyarakat akan kesana (agrowisata), akan menuju ke wisata-wisata untuk kesehatan" ujar Anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin Selasa (09/06).

Andi Akmal mengungkapkan, DPR akan mendorong pemerintah untuk memajukan daerah-daerah yang berpotensi dijadikan tempat destinasi agrowisata, mulai dari sisi anggaran maupun kebijakan. Agrowisata ini, lanjutnya, memiliki prospek yang bagus untuk ke depannya dan potensial untuk dikembangkan.

"Berbagai informasi dari teman-teman yang tersebar di berbagai daerah, ada beberapa yang melakukan riset atau penelitian ke Nusa Tenggara Barat, salah satunya ke Gunung Rinjani. Selain itu juga ada yang pengembangan bawang putih itu daerah agrowisata juga. Nah hal itu bisa kita



duplikasi ke daerah-daerah yang berpotensi untuk pengembangan" katanya.

Akmal mengakui, di Pulau Jawa sudah banyak daerah yang dijadikan pengembangan agrowisata. Dia mencontohkan seperti pada daerah Batu, Jawa Timur yang memiliki perkebunan apel dan dijadikan tempat agrowisata.

Menurutnya, hal ini dapat dijadikan konsep pengembangan, dan perlu adanya kerja sama yang baik antar pemerintah daerah terkait

masalah infrastruktur.

"Masa sidang sebelum sebelumnya, ketika covid-19 belum muncul, kita juga ke Jawa Tengah daerah kabupaten penghasil bawang juga. Wah itu sudah bagus-bagus banget itu, daerah dataran tinggi gitu, jadi dia agrowisata kopi. Agrowisata ini kan bisa diinisiasi oleh pemerintah daerah, atau swasta bisa juga berkolaborasi, sinergi gitu kan. Yang jelas pertanian itu bukan hanya menghasilkan pangan, tetapi bisa menjadi tujuan wisata" jelasnya.

## Harimau Rambah Pemukiman

# Hermanto Nilai Pemerintah Lalai Menjaga Hutan

“Binatang buas itu akan punah seperti halnya harimau Jawa apabila tidak dilakukan perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap hutan yang menjadi habitat hidup binatang buas tersebut.

### **Dr. HERMANTO, S.E., M.M**

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (14/06) — Anggota Komisi IV dari Fraksi PKS, Hermanto menilai, pemerintah lalai dalam menjaga kelestarian hutan yang menjadi habitat hewan langka yang mulai punah dan dilindungi undang-undang. Kawasan hutan itu semakin sempit dan akibatnya hewan langka tersebut sering kali memasuki perkampungan dan meresahkan warganya.

“Terakhir belum lama ini, dengan menggunakan perangkap, warga menangkap satu dari tiga ekor harimau Sumatera yang terlihat berkeliaran di Nagari Gantung Ciri, Kecamatan Kubung,

Kabupaten Solok. Binatang buas itu akan punah seperti halnya harimau Jawa apabila tidak dilakukan perlindungan dan pengawasan yang ketat terhadap hutan yang menjadi habitat hidup binatang buas tersebut”, papar Hermanto kepada wartawan.

Hermanto minta Pemerintah agar mengembalikan harimau yang ditangkap oleh warga tersebut ke habitat aslinya.

“Namun sebelum dilepas, harimau tersebut terlebih dahulu harus dipulihkan kondisinya agar bisa bertahan hidup di habitat aslinya,” ucap

legislator dari FPKS ini.

Lebih jauh Hermanto mendesak Pemerintah agar melakukan reboisasi hutan secara efektif.

“Juga pengawasan serta penindakan tegas terhadap pelaku illegal logging dan pemburu hewan langka di Sumatera, khususnya di Sumatera Barat,” tuturnya.

“Hutan di kawasan Sumatera Barat dan sekitarnya, belakangan ini mengalami penggundulan akibat aktivitas illegal logging dan penambahan”, imbuh legislator dari dapil Sumbang 1 ini.





FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA



**H. Ahmad Syaikhul**

Anggota Komisi V DPR RI

Sosialisasi UU  
LLAJ Tahun 2009

## **Syaikhul Singgung Soal SIM Seumur Hidup**

*Ini janji kampanye kita. Dan Alhamdulillah terus diperjuangkan. PKS telah memberikan beberapa catatan kepada Badan Keahlian. Selanjutnya mereka akan melakukan kajian, lalu membuat Naskah Akademik (NA) dan draft RUU. Kemudian akan dibahas menjadi sebuah Daftar Isian Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang*

## Sosialisasi UU LLAJ Tahun 2009

# Syaikhu Singgung Soal SIM Seumur Hidup

PKS telah memberikan beberapa catatan kepada Badan Keahlian. Selanjutnya mereka akan melakukan kajian, lalu membuat Naskah Akademik (NA) dan draft RUU. Kemudian akan dibahas menjadi sebuah Daftar Isian Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang

### H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Bekasi (15/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu melakukan sosialisasi UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ), di Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Ahad (14/6). Selain menyampaikan pasal-pasal penting di UU tersebut, Politisi PKS itu juga menyinggung SIM seumur hidup.

Syaikhu yang duduk di Komisi V DPR itu menyebut, ada beberapa pasal yang patut menjadi perhatian masyarakat pengguna jalan.

"Ada pasal-pasal penting

yang selama ini masih belum tersosialisasikan dengan baik. Padahal ini menyangkut keselamatan pengguna jalan," ujar Syaikhu.

Ada pasal yang mengatur Hak pejalan kaki atau pesepeda. Disebutkan tentang perlunya mengutamakan pejalan kaki atau pesepeda. Aturan ini termaktub dalam pasal 284 jo Pasal 106 ayat (2). Jika melanggar, diberi denda: Rp 500.000

Ada juga pasal 298 jo Pasal 121 ayat (1) tentang Berhenti dalam keadaan darurat. Jika tidak memasang

segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan, maka dikenakan denda Rp 500.000

Lalu ada Pasal 283 jo Pasal 106 (1) soal mengemudi tidak wajar. Maksudnya adalah melakukan kegiatan lain saat mengemudi, dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan. Jika melanggar, diberi denda Rp 750.000.

Kemudian pasal 296 jo Pasal 114 huruf (a) tentang Perlintasan Kereta Api. Disebutkan, mengemudikan kendaraan bermotor pada perlintasan antara kereta api dan jalan, tidak berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan atau ada isyarat lain akan dikenakan denda Rp 750.000.

Selanjutnya tentang kecepatan maksimum dan minimum. Jika melanggar aturan Batas Kecepatan paling Tinggi atau Paling Rendah,



diberi denda Rp 500.000. Ini terdapat pada pasal 287 ayat(5) jo Pasal 106 ayat (4) huruf (g) atau Pasal 115 huruf (a).

Terakhir, pasal 288 ayat (2) jo Pasal 106 ayat (5) huruf b soal SIM. Setiap pengemudi tidak membawa SIM, diberi sanksi denda Rp 250.000. Sedangkan bagi yang tidak memiliki SIM, seperti diatur pasal 281 jo Pasal 77 ayat (1), dikenakan denda Rpb1.000.000.

Soal SIM ini, Syaikhu menyinggung janji kampanye PKS pada 2019 lalu. Dia memastikan, partainya terus memperjuangkan agar SIM berlaku seumur hidup. Tidak

hanya berlaku selama 5 tahun dan kemudian harus diperpanjang seperti diatur dalam pasal 85 UU LLAJ Tahun 2009.

"Ini janji kampanye kita. Dan Alhamdulillah terus diperjuangkan," tegas Syaikhu.

Sejauh ini, ungkap Syaikhu, pihaknya telah melakukan rapat koordinasi dengan Badan Keahlian DPR RI saat membahas prolegnas prioritas 2020 di Komisi V dan khusus UU terkait Transportasi dan Jalan yang telah masuk Prolegnas dan harus segera dibahas.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

Keluarkan Kebijakan Pengendalian Transportasi di Masa Covid-19,

# Syahrul: Pemerintah Tidak Konsisten!

Logika apa yang mau dibangun pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat. Orang-orang disuruh mengikuti protokol kesehatan di lain sisi orang-orang dihadapkan dengan peperangan yang nyata di garda terdepan dengan pandemi Covid-19

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Pekanbaru (10/06) — Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKS, Syahrul Aidi Mazaat, menanggapi lahirnya Permenhub 41 Tahun 2020, tentang Perubahan Atas Permenhub 18 Tahun 2020, tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegah Penyebaran Covid-19.

Menurut Syahrul, relaksasi pembatasan dalam Permenhub 41 Tahun 2020, tidak ada referensi yang jelas, karena memang New Normal hanya di klaim sepihak pemerintah tanpa beleid yang jelas.

"Efek dari ketidakjelasan New Normal ini mengakibatkan

teknis pelaksanaan di lapangan menjadi absurd melalui kebijakan di berbagai kementerian termasuk Kementerian Perhubungan," ungkap Syahrul.

Anggota Komisi V yang berasal dari Riau ini, memberi contoh pada Permenhub pasal 14 (a) mengambil diskresi Menteri dengan tidak mencantumkan persentase/kuantitas pembatasan.

"Alhasil nanti akan terjadi kemungkinan diskriminasi penerapan di lapangan. Ada yang diperbolehkan ada yang tidak," terangnya.

Permenhub ini, lanjut

Syahrul, membuka peluang besar terjadinya gelombang kedua pandemi Covid 19 yang luar biasa.

"Karena ketidakkonsistenan isinya, disaat orang diminta menjaga jarak, namun persentase orang berkumpul dalam satu moda transportasi melebihi 70% atau tidak dibatasi di beberapa moda," keluhnya.

Pertanyaan selanjutnya, kata Syahrul, Logika apa yang mau dibangun pemerintah untuk menyelamatkan masyarakat.

"Orang-orang disuruh mengikuti protokol kesehatan di lain sisi orang-orang dihadapkan dengan peperangan yang nyata di garda terdepan dengan pandemi Covid-19," paparnya.

Sekali lagi, Syahrul menghimbau Pemerintah agar lebih arif dan bijaksana dalam mengeluarkan kebijakan berdasarkan riset.

"Sekali lagi riset dulu baru keluaran kebijakan. Karena persoalan epidemiologi tidak bisa memakai pelajaran sepihak yang tidak jelas goal dan standarnya," tutup Syahrul.



## Pelonggaran PSBB

# Anggota Fraksi PKS: Protokol Kesehatan Kunci Perbaikan Ekonomi

"Jangan sampai pusat-pusat pergerakan ekonomi ini malah menjadi klaster baru penularan Virus Covid-19 di masyarakat. Tidak bisa dibayangkan kalau hal tersebut terjadi, maka aktifitas ekonomi akan berhenti lagi dan dampak yang dihadapi semakin buruk untuk kita,

### **H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos**

Anggota Komisi VI DPR RI

Bekasi (12/06) — Tidak bisa dipungkiri, pelonggaran PSBB yang digulirkan Pemerintah selama beberapa hari terakhir, disambut antusias warga terutama dari sisi ekonomi, yang beberapa bulan ini nyaris tak bergerak.

Kegembiraan ini bahkan dianggap sebagai euphoria. Ekonomi hidup kembali dari level atas sampai ke bawah dan disema sektor, terutama terciptanya lagi lapangan kerja dan me-

nurunnya angka pengangguran, daya beli masyarakat meningkat dan beban Pemerintah akan semakin ringan.

Namun yang menjadi catatan penting yakni kewaspadaan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Tak hanya itu, Pemerintah pun harus memelopori dan menjadi contoh penerapan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya. Demikian disampaikan Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Mahfudz Abdurra-

hman di Jakarta belum lama ini.

"Kita apresiasi keberanian Pemerintah yang membuka kembali semua aktivitas dan kegiatan masyarakat, khususnya dalam pergerakan ekonomi. Semua pihak dan kalangan merespon dengan baik," ungkap Mahfudz.

Tapi, lanjutnya, kita tidak boleh lupa dan lengah, ada potensi ancaman meningkat kembali positif Covid19 di masyarakat. Karena sampai saat ini belum ada obat/vaksinnya, dan menjadi ancaman laten untuk kita semua.

"Kedisiplinan dan ketegasan dalam menjalankan aturan yang sudah dibuat, harus menjadi kewajiban," tegas Anggota Komisi VI DPR RI ini.

Protokol kesehatan itu, kata Mahfudz, untuk kita sendiri manfaatnya, maka harus jadi kebutuhan, bukan hanya kewajiban.

"Jangan sampai pusat-pusat pergerakan ekonomi ini malah menjadi klaster baru



penularan Virus Covid-19 di masyarakat. Tidak bisa dibayangkan kalau hal tersebut terjadi, maka aktifitas ekonomi akan berhenti lagi dan dampak yang dihadapi semakin buruk untuk kita," terang Mahfudz.

Sekali lagi, kata Mahfudz, kuncinya pada ketegasan, konsistensi dan disiplin menjalankan protokol kesehatan.

"Jika 3 hal itu bisa kita laksanakan dengan baik, maka kita tidak akan mudah tertular virus Covid-19," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, beberapa hari ini tingkat penularan virus Covid-19 masih tinggi, terutama di kota-kota besar yang merupakan pusat pergerakan ekonomi. "Ini harus jadi warning untuk kita", imbuhnya.

Selanjutnya Mahfudz

Abdurrahman menyampaikan bahwa pemerintah baik di pusat dan daerah harus menjadi pelopor dan teladan yang nyata, dalam melaksanakan protokol kesehatan.

"Mereka harus memberi contoh yang baik, jangan malah sebaliknya atau dengan kata lain tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan benar. Dalam hal mengeluarkan kebijakan juga jangan malah menjadi hal yang sulit dilaksanakan, apalagi saling bertentangan antar unsur pemerintah, fokus utama adalah Kesehatan. Kalau semua sudah aman, baru kita bisa bicara ekonomi, karena resiko yang kita hadapi sangat besar," tandasnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Amin Ak Minta Anak Cucu BUMN Tidak Mematikan Bisnis UMKM

Saya terus mendukung aspirasi pelaku UMKM agar pelaku Usaha Mikro dan Kecil dibebaskan dari pajak penghasilan serta diberi kemudahan dan dibebaskan dari biaya perijinan

## **AMIN AK, M.M.**

Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya (07/06) — Anggota Komisi VI dari Fraksi PKS, Amin Ak kembali meminta keseriusan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui anak cucu BUMN, untuk tidak merecoki bisnis rakyat kecil yang dijalankan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Amin melihat masih banyak anak-cucu usaha BUMN yang mengerjakan bisnis yang bisa mematikan bisnis UMKM, sehingga peran UMKM terpinggirkan.

Hal itu disampaikan Amin setelah menerima aspirasi dari para pelaku UMKM, Sabtu (06/06) malam secara virtual.

"Para pelaku UMKM mengeluhkan sulitnya menjalankan usaha mereka diantaranya karena harus bersaing dengan bisnis BUMN dan anak cucunya. Bahkan sebagian mengeluhkan transaksi bisnis mereka yang tidak atau belum dibayar oleh BUMN dan anak cucunya, dengan nilai mencapai belasan miliar rupiah", katanya.

Menurut Amin, tentu sulit bagi UMKM untuk bersaing dengan BUMN. Sebagai contoh, manakala ada kegiatan, BUMN akan memakai anak usahanya di bidang perhotelan atau katering untuk menyediakan akomodasi.

la menilai perlu ada persaingan yang fair agar Usaha Mikro dan Kecil bisa naik kelas setidaknya ke level menengah. BUMN dan anak cucunya justru harus mampu bersinergi dengan pelaku UMKM bukan mematikan. BUMN dan anak cucunya silahkan ambil atau ciptakan usaha yang tidak dilakukan UMKM.

Anggota DPR dari Dapil Jatim IV (Kabupaten Jember dan Lumajang) itu menyontohkan, usaha jasa parkir di Bandar Soekarno Hatta, itu ternyata dikelola oleh anak perusahaan BUMN, dan UMKM hanya diberi peran pelaksana yang kurang menguntungkan.

"Kalau memang BUMN core kompetensinya pengelolaan bandara, ya jangan ambil usaha katering atau jasa parkir. Itu kan bisa dilakukan oleh UMKM," imbuhnya.

Dalam diskusi serap aspirasi Sabtu malam, terungkap jika selama ini yang terjadi adalah iklim usaha tidak mendukung UMKM.

Amin menyebut UMKM



kerap bersaing dengan BUMN sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat. Bahkan tidak sedikit BUMN atau anak BUMN yang bermitra dengan UMKM namun pembayaran hak UMKM dipersulit bahkan tidak dibayar.

"Saya terus mendukung aspirasi pelaku UMKM agar pelaku Usaha Mikro dan Kecil dibebaskan dari pajak penghasilan serta diberi kemudahan dan dibebaskan dari biaya perijinan," pungkasnya.

Amin juga menyoroti program orang tua asuh dari BUMN ke UMKM yang pada umumnya masih bersifat formalitas. Pembinaan terhadap UMKM pada umumnya belum mampu meningkatkan level UMKM baik dari sisi teknologi

maupun daya saing.

"Seharusnya kemitraan BUMN dan UMKM itu lebih melibatkan UMKM dalam proses produksi yang dilakukan BUMN, sehingga UMKM mampu menghasilkan inovasi-inovasi baru," tandas Amin.

Oleh karena itu Amin mendesak agar ada bagian dari laba BUMN yang dialokasikan untuk penelitian dan pengembangan UMKM selain yang selama ini sudah disisihkan untuk Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

"BUMN harus mengalokasikan dana untuk penguatan inovasi dan teknologi UMKM agar mereka naik kelas dan mampu bersaing dengan produk-produk impor," tutup Amin.

# Anggota Fraksi PKS Minta Dana APBN Jangan Ceroboh Digunakan untuk BUMN

Pemberian dana kepada BUMN, yang tidak terkait dengan penanganan wabah Covid-19 dan memprioritaskan penyelamatan Usaha Rakyat Kecil akibat terpuruknya perekonomian di masa pandemi, baik dalam bentuk PMN, Pembayaran Utang maupun Dana Talangan sebaiknya ditunda dulu

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (11/06) — Memantau situasi di Komisi VI DPR RI melalui jarak jauh akibat wabah covid-19, Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Nevi Zuairina mengkritisi adanya rapat kerja dadakan di masa reses pada Selasa, (09/06/2020) lalu.

Pasalnya, menurut Nevi, tidak lazim ada rapat kerja di masa reses dan agendanya sangat sensitif yakni rapat kerja komisi VI DPR dengan Kementerian BUMN yang bertema Pembayaran Hutang Pemerintah kepada BUMN dan Penyertaan Modal Negara.

"Agak sensitif dan sulit di kontrol rapat di masa reses ini, pembahasannya melibatkan pencairan uang negara untuk BUMN sebesar Rp. 152,5 Triliun. Mekanismenya rancu dengan tiga pola yakni pembayaran utang atau kompensasi, penyer-taan modal negara (PMN), dan dana talangan. Ini tidak dapat digabungkan pembahasannya. Harus dipisah. Karena akan menimbulkan kerancuan dan mengakibatkan kecerobohan", kritis Nevi.

Legislator PKS asal Sumbar ini menggambarkan,

bahwa ratusan BUMN, yakni sebanyak 142 BUMN tidaklah sehat semua. Bahkan mayoritas kritis. Hanya sekitar 15an saja yang memberi kontribusi terhadap negara, itupun masih perlu pengawasan ketat.

Perlu diakui, lanjutnya, Bahwa semua pihak termasuk BUMN terkena dampak signifikan akibat pandemi covid-19. Tapi yang terdampak bukan hanya BUMN, swasta terutama UMKM lebih terasa lagi yang sebagian besar tak ada yang menolong. Dengan stimulus sebesar Rp. 152,5 Triliun untuk BUMN, apalagi dengan situasi latar belakang Hutang pemerintah kepada BUMN sebesar Rp. 108,48 triliun, PMN sebesar Rp. 25,27 triliun dan Bantuan dana talangannya sebesar Rp. 19,65 triliun, dalam bentuk jaminan akan semakin menimbulkan kecemburuan dan berbagai persoalan kompleks lain di masa mendatang.

"Ini persoalan kedepan akan semakin rumit pengendaliannya. Pertama, pengawasan dana jumbo Rp. 152,5



triliun, bila DPR saja yang ngawasi, bakalan meleset dimana-mana. Kedua, BUMN sebagai regulator sekaligus operator korporasi, menjadi semakin dimanja dan sumber kecemburuan pihak swasta yang hidup, tumbuh dan mati dengan usaha sendiri. Ketiga, rapat yang dilakukan dimasa reses, kemudian menggabungkan antara PMN, PSO dan pembayaran hutang negara menjadi sangat rancu dan menimbulkan kecurigaan", Jelas Nevi.

Anggota komisi VI yang sangat fokus terhadap pelaku usaha mikro, kecil dan menengah ini menyoroti, dengan dimanjanya BUMN dengan berbagai kemudahan APBN, dia regulator, dia juga operator, tapi masyarakat tidak diberikan kemandirian

dalam pelayanannya.

Sebagai fakta, Sebelumnya persoalan BPJS yang naik hampir dua kali lipat, dan yang akan diterapkan berupa iuran Tapera yang sangat membebarkan pekerja dan Usaha Kecil Menengah.

"Kasihannya Rakyat, kehidupannya diperas dengan regulasi", katanya dengan miris.

Nevi mengatakan, Fraksinya menyarankan, kedepannya PMN harus memberikan multiplayer effect. Seleksi dilakukan pada BUMN yang mempunyai manajemen baik dan direksi yang taat pada aturan Undang-Undang, sehingga pemberian PMN dapat mencapai hasil maksimal.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



# Tagihan Listrik Melonjak, PLN MENGECEWAKAN!

“

Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan. PLN jangan biarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik PLN mengecewakan

**Dr. H. Mulyanto, M.Eng.**

Anggota Komisi VII DPR RI



## Tagihan Listrik Melonjak

# Wakil Ketua PKS: PLN Mengecewakan!

Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan

### Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Komisi VII DPR RI

Tangerang (06/06) — Menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait lonjakan tagihan listrik bulan Juni 2020, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto minta PLN segera membuka posko pengaduan baik secara online atau langsung.

Menurut Mulyanto, PLN harus bisa menjelaskan secara rinci penyebab kenaikan tagihan listrik masing-masing pelanggan.

"PLN jangan hanya berpatokan pada argumentasi standar bahwa lonjakan ini terjadi karena ada perubahan

sistem perhitungan yang semula berdasar angka catat meter menjadi angka rata-rata", ungkap Mulyanto.

Faktanya, lanjut Mulyanto, ada banyak kasus lonjakan kenaikan yang melebihi angka rata-rata selama 3 bulan terakhir. Bahkan ada pelanggan yang mengalami lonjakan tagihan hingga 300%.

"Kalau benar perhitungan berdasarkan angka rata-rata pemakaian selama 3 bulan terakhir, angkanya tidak mungkin melonjak secara drastis. Ini pasti ada faktor lain yang perlu dijelaskan PLN. Dan

itu harus disampaikan secara jelas kepada setiap pelanggan. PLN jangan biarkan pelanggan bingung dan menerka-nerka penyebab lonjakan tagihan listrik. Keluhan ini harus ditanggapi segera. Jika masalah tagihan ini tidak dapat diselesaikan secara baik PLN mengecewakan," ujar Mulyanto.

Mulyanto menyarankan PLN membuat terobosan baru dalam hal penghitungan tagihan listrik. Jangan lagi gunakan cara lama yang terbukti merugikan masyarakat.

"Sebagai perusahaan yang didukung SDM unggul dan teknologi mutakhir harusnya PLN mampu menyediakan berbagai alternatif sistem penghitungan tagihan listrik secara cepat," tandasnya.

Bila perlu, katanya, dibuat sistem atau aplikasi tagihan secara interaktif agar pelanggan bisa mengecek besaran tagihan yang perlu dibayarkan. Jika dinilai tidak sesuai dengan penggunaan maka saat itu pelanggan bisa mengajukan keberatan.

"Ini soal pelayanan pada pelanggan. Seharusnya PLN



mengembangkan sistem pelayanan tagihan listrik di masa pandemi ini sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan dalam melaporkan angka meteran listrik di rumahnya masing-masing secara akurat dan tepat waktu. Petugas PLN harus sigap menyelesaikan pengaduan para pelanggan terkait tagihan tarif listrik tersebut dan segera melaksanakan langkah koreksi," tegas anggota DPR RI daerah pemilihan Banten 3 ini.

Sehubungan dengan kirsurh lonjakan tarif ini Mulyanto juga minta PLN meniadakan untuk sementara

sanksi denda dan pemutusan listrik bagi pelanggan yang tidak dapat membayarkan tagihan. Menurut Mulyanto, masyarakat harus diberi kesempatan mengklarifikasi besaran tagihan yang menjadi kewajibannya.

"Intinya selesaikan dulu soal penghitungan tagihan listrik ini lah. Jangan sampai masyarakat dikenakan sanksi untuk sesuatu yang belum jelas duduk perkaranya. Selama PLN belum dapat menyelesaikan urusan penghitungan tagihan listrik ini sebaiknya penerapan sanksi denda dan pemutusan sambungan ditiadakan," pungkas Mulyanto.

## RUU Omnibus Law Ciptakerja tentang Jaminan Produk Halal,

# Iskan: Berikan Kewenangan pada MUI!

Jangan sampai keterlibatan Ormas Islam lain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Jangan dengan dalih bahwa semua proses harus cepat, tetapi mengabaikan originalitas kehalalan suatu produk, ke depan akan banyak Ormas Islam nantinya yang bisa menjadi otoritas pemberi fatwa halal.

## H. ISKAN QOLBA LUBIS, M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (11/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Iskan Qolba Lubis, menanggapi perlunya keterlibatan Ormas Islam dalam proses sertifikasi halal yang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.

Menurut Anggota Komisi VIII ini, sejumlah pasal dalam RUU tersebut mengatur bahwa penetapan produk halal tak hanya bisa dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) seperti dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH).

"Ketentuan soal halalnya suatu produk, diatur nantinya dalam pasal 49 RUU cipta kerja. Pada pasal 49 RUU cipta kerja

ada beberapa hal yang diubah seperti : 'Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal'," demikian bunyi angka 10, pasal 49 RUU Cipta kerja, papar Iskan.

Ketentuan tersebut, lanjut Iskan, mengubah ketentuan sebelumnya yaitu UU JPH yaitu 'Sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI', di angka 10 UU JPH.

Iskan menyampaikan pada pasal atau ketentuan yang tercantum dalam RUU omnibus law itu (pasal 49 RUU Cipta

kerja) menyatakan, bahwa MUI tidak lagi menjadi sumber hukum dalam legalisasi sertifikasi halal suatu produk.

"Di sisi lain, menteri agama, Fachrul Rozi menyampaikan pidato beberapa waktu yang lalu bahwa, 'Ormas Islam yang berbadan hukum bisa keluarkan fatwa halal demi percepatan'," jelasnya.

Menteri Agama, katanya, tidak ingin MUI menjadi lembaga tunggal penerbitan sertifikasi halal, menteri agama mengatakan peluang kerjasama antara Badan Penyelenggara Jaminan produk halal (BPJPH) dengan beberapa Ormas Islam lainnya harus dibuka demi mempercepat penerbitan sertifikasi halal.

Iskan juga mengkritisi draft RUU Ciptaker usulan pemerintah dimana dihapuskan otoritas Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam penerbitan sertifikasi halal.

"Jangan sampai keterlibatan Ormas Islam lain menimbulkan ketidakpastian hukum bagi konsumen. Jangan dengan dalih bahwa semua proses harus cepat, tetapi mengabaikan originalitas kehalalan suatu produk," tegas Iskan.

Iskan menambahkan, ke depan akan banyak Ormas Is-



lam nantinya yang bisa menjadi otoritas pemberi fatwa halal.

"Ini akan mengakibatkan standar ganda dalam penerbitan sertifikasi halal, karena bisa jadi antar lembaga fatwa halal nantinya memiliki definisi yang berbeda dalam penetapan sertifikasi halal," paparnya.

Tanpa ada penamaan atau keseragaman, imbuhnya, dikhawatirkan ada perbedaan penyimpulan atas halal atau tidaknya suatu produk. "Belum lagi nantinya bisa memicu munculnya tarik-menarik

kepentingan ekonomi dan perbedaan fikh", tambahnya.

Iskan melanjutkan, kondisi ini akan menyebabkan ketidakharmonisan antar Ormas Islam yang sudah terjalin solid dan koordinasi yang cukup baik.

Legislator PKS ini khawatir RUU terkait jaminan produk halal bisa menimbulkan banyak masalah ke depannya, terlepas beberapa pihak beranggapan dengan adanya dampak positif maupun negatifnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Klarifikasi Menag Atas Pembatalan Haji,

# Aleg PKS: Bukti Menteri Agama Gagal Paham

“Keputusan pemberangkatan atau pembatalan keberangkatan jemaah haji itu harus sesuai Undang-undang. Dalam proses pemberangkatan jemaah haji itu harus ada kesepakatan antara Komisi VIII DPR RI dengan Pemerintah (Kemenag). Pertanyaannya adalah, apakah kesepakatan antara DPR RI dengan Kemenag juga batal?”

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Jakarta (10/06) — Menanggapi klarifikasi yang disampaikan oleh Menteri Agama soal pembatalan haji tahun 2020, Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menganggap bahwa Menteri Agama gagal paham.

Menurut Bukhori, terdapat banyak kekeliruan dari empat poin penting klarifikasi Menteri Agama yang perlu diluruskan soal keputusannya membatalkan haji.

"Poin pertama, terkait keputusan pembatalan haji oleh

Kemenag bukan atas perintah Presiden Jokowi tetapi setelah koordinasi dengan Kemenkum HAM", paparnya.

Bukhori menganggap apa yang disampaikan oleh Menteri Agama bertentangan dengan berita yang beredar di media. Selain itu, Menag juga dinilai menyalahi wewenang dan merendahkan jabatan Presiden.

"Secara yuridis, pembatalan dan pemberangkatan haji seharusnya dilakukan berdasarkan kesepakatan antara DPR RI dengan

Pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama. Sebab, hal ini sudah diatur di Pasal 36 dan 47 UU No. 8/2019. Jadi, bukan dengan pihak luar (red: Kemenkum HAM)" ungkap Bukhori di Jakarta, Rabu (10/06).

Menurutnya, langkah meminta pendapat hukum ke Kemenkum HAM juga tidak tepat dan benar dikarenakan tugas Kemenkum HAM adalah menerima harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan di bawah UU, termasuk Keputusan Menteri.

"Apakah Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 494 tahun 2020 sebelum diterbitkan sudah diharmonisasi oleh Kemenkum HAM?" cetusnya.

Poin kedua, lanjutnya, terkait langkah Menteri Agama bersurat kepada Pemerintah Arab Saudi untuk meminta agar tidak menerbitkan visa undangan (mujamalah) atau visa mandiri (furada).

Bukhori menilai langkah tersebut tidak lazim dan seolah ikut campur terhadap urusan negara lain. Ia memandang bahwa kebijakan penerbitan



visa adalah kewenangan Pemerintah Arab Saudi sehingga Pemerintah Indonesia tidak bisa bertindak sesuai kehendaknya.

"Jika mengacu pada UU No. 8/2019 Pasal 82 ayat (2) huruf (e) disebutkan bahwa Jemaah haji yang menggunakan visa haji mujamalah undangan Pemerintah Arab Saudi cukup melaporkan penyelenggaraan ibadah haji khusus kepada Menteri. Tidak perlu kemudian Pemerintah Indonesia sampai bersurat ke Pemerintah Arab Saudi. Silakan dibaca kembali undang-undangnya" tegasnya

Poin ketiga, terkait dengan dana haji yang diklaim aman dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Bukhori mencermati bahwa dengan

terbitnya KMA No. 494 Tahun 2020 justru secara substansi melampaui kewenangan Kementerian Agama.

Pertama, di dalam KMA diatur kewenangan BPKH dan merubah mekanisme pengadaan barang dan jasa yang jelas sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa seperti pelayanan konsumsi, transportasi, dan petugas haji. Intinya KMA 494 tahun 2020 terasa seperti Perppu, tukas Bukhori.

Poin keempat, terkait bantahan Menteri Agama terhadap pihak yang menilai keputusannya membatalkan haji dilakukan terburu-buru. Selengkapnya di fraksi.pks.id

Busana Indonesia Tak Bisa Diekspor ke Timur Tengah

# Nur Azizah Desak Kemenag Terapkan Standar Halal

Tekstil halal di negara kita belum ada. Sementara Jepang yg minoritas muslim, sertifikat busana halalnya diakui Saudi Arabia. Ini tidak dilakukan negara kita, agar Produk Garmen Indonesia dapat diekspor ke Timur Tengah.

**Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.**

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (09/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, merespon penerapan Standard Busana Halal yang belakangan tak bisa diekspor ke Timur Tengah.

Anggota DPR RI dari Dapil Jawa Barat VI ini mengatakan sertifikasi busana halal Indonesia, belum diakui oleh sertifikasi busana Negara Arab Saudi.

"Tekstil halal di negara kita belum ada. Sementara Jepang yg minoritas muslim, sertifikat busana halalnya diakui Saudi Arabia," ungkapnya.

Sementara Indonesia, lanjut Nur Azizah, yang mayoritas muslim tidak berjuang mempersiapkan Standard

Sertifikat Busana Halal.

"Ini tidak dilakukan negara kita, agar Produk Garmen Indonesia dapat diekspor ke Timur Tengah," ujar Nur Azizah dalam rangkaian resesnya di Depok, Jawa Barat.

Menurut Nur Azizah, sertifikat Busana Halal di Indonesia yang mayoritas muslim dan mempunyai banyak UMKM garmen dan pabrik tekstil harus difasilitasi, agar produk mereka dapat diekspor ke negara yang konsumennya peduli terhadap sertifikat Busana Halal.

"Kemenag RI harus segera memfasilitasi terbitnya Standar Sertifikat Busana Halal," tegasnya.

Pada Era Adaptasi Kebiasaan Baru akibat Pandemi Covid-19 ini, lanjutnya, Kemenag RI bisa berkontribusi bagi terbukanya lapangan kerja baru, UMKM dan Industri Tekstil Indonesia yang dapat mengeksport produk mereka dengan bersertifikat Busana Halal.

"Serap aspirasi dengan tokoh masyarakat maupun masyarakat secara umum diharapkan melahirkan program prioritas pada kepentingan masyarakat serta memperbaiki kebijakan dan manajemen pemerintahan yang menguntungkan masyarakat banyak," tutup Nur Azizah.



Tudingan terhadap Tenaga Kesehatan,

# Netty: Kesalahan Pemerintah Lambat Lakukan Proses Diagnostik

Kita masih ingat bagaimana para nakes harus menghadapi pasien dengan menggunakan jas hujan dan helm, masker non medis, atau mencari bantuan kesana kemari guna menyelamatkan pasien. Bahkan tidak sedikit nakes yang akhirnya gugur karena terpapar Covid-19. Jangan lukai hati mereka dengan membiarkan fitnah dan ujaran kebencian menyerang nakes,

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (09/06) — Beberapa hari ini, di media sosial menyebar tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan terkait pelayanan kesehatan dan penetapan status pasien PDP maupun positif covid-19.

Beragam komentar muncul, mulai dari yang menyalahkan, membenarkan dan ada pula yang menuduh ini sebagai permainan dokter agar bisa

mendapatkan keuntungan.

Tudingan kepada dokter dan tenaga kesehatan ini, mendapatkan perhatian dari Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS Netty Prasetyani Heryawan.

"Saya prihatin dengan tersebarnyanya tuduhan bahwa dokter mendapatkan keuntungan besar saat penanganan Covid-19," katanya dalam keterangan

media, Selasa (09/06).

"Pemerintah harus bertindak tegas mencari pihak yang menyebarkan info tersebut. Saya khawatir dokter dan nakes yang selama ini sudah berjuang sekuat tenaga akan kecewa dan menyerahkan penanganan pasien Covid-19 kepada pemerintah. Jika ini yang terjadi, maka pengendalian Covid-19 yang saat ini sudah diwacanakan memasuki tahap new normal, akan menemui jalan buntu," tambah Netty.

Kekawatiran Netty ini beralasan mengingat beberapa hari yang lalu sudah muncul pernyataan sikap dari 16 Organisasi Profesi Kesehatan yang satu suara menganggap tudingan lahan bisnis sebagai ujaran kebencian, fitnah, hoaks dan tindakan sewenang-wenang terhadap tenaga kesehatan.

Dalam surat pernyataan tersebut, dikatakan, guna menghindari benturan-benturan selanjutnya, maka tenaga kesehatan akan menyerahkan



tugas dan tanggungjawab penanganan Covid-19 kepada pemerintah.

Tidak berlebihan tuntutan mereka agar kasus ini diurus tuntas dan para pelakunya diberikan sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Wajar sekali mereka mengatakan akan mundur dan menyerahkan tanggungjawab, jika pemerintah tidak segera bertindak. Bayangkan, tenaga kesehatan sudah bekerja keras dan mempertaruhkan nyawa untuk melayani pasien, lalu dituduh menjadikan pandemi sebagai lahan bisnis, siapa yang bisa menerima?" terang Netty.

Apalagi selama ini mereka juga menyaksikan bahwa sebagian masyarakat ternyata

tidak membantu tugas mereka, karena tetap berkerumun dan mengabaikan protokol kesehatan.

Terkait adanya polemik mengenai pasien yang meninggal serta dikuburkan melalui prosedur Covid-19 tapi ternyata negatif, Netty melihat ini sebagai kelemahan diagnostik Covid-19 oleh pemerintah.

"Selama ini warganet salah paham dan menuding rumah sakit sengaja membuat konspirasi agar pasien ditetapkan sebagai positif Corona untuk mendapatkan anggaran Covid-19, padahal ini terjadi karena lambatnya proses diagnostik," kata Netty

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

## Jokowi Naikkan Iuran BPJS

# Mufida: Buat Resah dan Bebani Rakyat!

Pemerintah bukannya membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan (2), Perpres Nomer 75 Tahun 2019, yang dilakukan justru Pemerintah menerbitkan Perpres baru yang kembali membebani rakyat juga membuat resah dan galau seluruh rakyat

**Dr. Hj. KURNIASIH MUFIDAYATI, M.Si.**

Anggota Komisi IX DPR RI

Jakarta (12/06) — Anggota Fraksi PKS tak bosan terus mengkritisi soal kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. Kenaikan iuran ini dinilai tak tepat di tengah pandemi Corona (Covid-19).

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat secara resmi menolak kenaikan iuran BPJS. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 menyangkut kenaikan iuran BPJS Kesehatan dinilai kurang tepat.

"Tidak tepat waktunya dan tidak menindaklanjuti keputusan

agar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS dapat segera diimplementasikan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga harus setuju dengan putusan MA serta hasil RDP.

"Pemerintah bukannya membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan (2), Perpres Nomer 75 Tahun 2019, yang dilakukan justru Pemerintah menerbitkan Perpres baru yang kembali membebani rakyat juga membuat resah dan galau seluruh rakyat," ujar Mufida. Mufida kecewa terhadap pemerintah yang mengabaikan kesimpulan hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Dewas BPJS dan Direksi BPJS Kesehatan pada 30 April 2020.

Mufida menyebut dalam laporan singkat atau lapsing di forum RDP tersebut, Komisi IX DPR mendorong percepatan

agar putusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan kenaikan iuran BPJS dapat segera diimplementasikan. Selain itu, BPJS Kesehatan juga harus setuju dengan putusan MA serta hasil RDP.

"Pemerintah bukannya membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan (2), Perpres Nomer 75 Tahun 2019, yang dilakukan justru Pemerintah menerbitkan Perpres baru yang kembali membebani rakyat juga membuat resah dan galau seluruh rakyat," ujar Mufida.

Mufida memahami bila BPJS Kesehatan sedang mengalami kesulitan dalam tata kelola keuangan. Namun, jangan sampai jalan keluar yang dipilih untuk menyelesaikan kesulitan itu justru membebani rakyat saat pandemi.

"Pemerintah pasti punya caralah, 1.001 cara untuk menyelesaikan itu. Poin-poin detail dalam Lapsing RDP 30 April juga memberikan rekomendasi bagaimana kalau terjadi defisit. Tapi jangan dibebankan ke masyarakat," ujarnya.



## Terkait Pembukaan Sekolah

# Fikri Fakhri: Pastikan Kurva Sudah Capai Titik Kulminasi

Opsi belajar dari rumah atau (BDR) masih menjadi pilihan yang paling memungkinkan dilakukan saat ini, dimana keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR.

### Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Semarang (09/06) — Membuka kembali sekolah di masa pandemi ini bukan perkara mudah. Selama Covid-19 belum benar-benar hilang, atau kurva masih belum landai, masuk sekolah terlalu beresiko.

Zona hijau sekalipun tidak bisa menjadi acuan untuk membuka sekolah, karena pergerakan masyarakat sangat dinamis.

Apalagi batas antara zona merah dan hijau itu sangat berdampingan. Belum lagi sampai saat ini penetapan

standard zona merah masih belum jelas. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih (9/10).

Fikri mencontohkan, Kota Tegal yang ditetapkan sebagai zona hijau dan sudah menerapkan new normal, belum sepenuhnya aman karena Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang statusnya masih zona merah.

"Tidak ada yang bisa menjamin semua pergerakan

orang itu terpantau. Di era new normal, masyarakat sangat leluasa bergerak lintas zona," ungkap anggota yang terpilih dari Dapil Jawa Tengah IX tersebut.

Fikri menjelaskan, di beberapa tempat publik seperti rumah makan, pusat perbelanjaan, kantor-kantor, sudah menerapkan standar protokol covid-19, tetapi pergerakan orang tidak dapat dikendalikan, kecuali dengan kesadaran.

"Terkait dengan sekolah, Pemerintah bisa belajar dari pengalaman negara-negara lain, setelah kembali membuka kegiatan belajar mengajar, sekolah justru menjadi kluster baru penyebaran Covid-19. Jangan sampai itu terjadi di Indonesia," ungkapnya.

Menurut Fikri, opsi belajar dari rumah atau (BDR) masih menjadi pilihan yang paling memungkinkan dilakukan saat ini, dimana keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi



pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR.

Hal ini tertuang dalam SE Sekjen Kemendikbud No. 15 tentang Pedoman Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran Covid-19, yang memperkuat SE sebelumnya, yakni SE Mendikbud Nomor 4 Tahun 2020 tentang

Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Coronavirus Disease (Covid-19).

"Sampai kapan BDR ini berlangsung? Sampai kurva mencapai titik kulminasi, jumlah kasus sudah mengalami penurunan dan semua pihak sudah sepakat karena dilibatkan dalam pengambilan keputusan bersama," kata Fikri.

# Legislator PKS Minta Pemerintah Harus Antisipasi Ledakan Kemiskinan

pemerintah harus mengantisipasi dan mendesain strategi khusus menanggulangi lonjakan angka kemiskinan. Pemerintah harus mengurangi beban pengeluaran rakyat, yaitu dengan menurunkan administered price seperti harga BBM. Karena kan BBM ini salah satu komponen terbesar pengeluaran orang miskin, sebanyak 5 pesen rakyat miskin di kota dan 4 pesen di desa

## H. HIDAYATULLAH, S.E

Anggota Komisi XI DPR RI

Medan (18/06) — Menurut prediksi Bank Dunia akibat pandemi Covid-19 diperkirakan penduduk miskin di Indonesia bakal bertambah antara 5 juta hingga 9 juta jiwa.

Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS, Hidayatullah mengatakan pemerintah harus mengantisipasi dan mendesain strategi khusus menanggulangi lonjakan angka kemiskinan

(17/6/2020).

ebih lanjut Hidayatullah menyatakan pemerintah harus mengurangi beban pengeluaran rakyat, yaitu dengan menurunkan administered price seperti harga BBM.

"Karena kan BBM ini salah satu komponen terbesar pengeluaran orang miskin, sebanyak 5 pesen rakyat miskin di kota dan 4 pesen di desa,"

kata Hidayatullah.

Legislator PKS ini menyesalkan kinerja pengurangan angka kemiskinan di era pemerintahan sekarang, karena selama ini kurang memuaskan.

Menurutnya pada periode 2009-2014 setiap tahunnya kemiskinan rata-rata berkurang 0,58 persen, sedangkan pada era pemerintahan saat ini hanya berkurang 0,26 persen per tahun saja.

"Ditambah dengan hantaman dari pandemi Covid-19, lemahnya kinerja pengurangan angka kemiskinan membuat pengentasannya semakin rumit," ujar Hidayatullah.

Menurut Hidayatullah pemerintah harus melakukan pemutakhiran data kemiskinan juga mengeluarkan kebijakan yang lebih spesifik untuk mengatasi kemiskinan.

"Jangan lupa bahwa saat ini jumlah kelompok rentan miskin dan hampir miskin ada sekitar 60 juta rakyat, pemerintah harus proaktif dan progresif," kata Hidayatullah.



# Junaidi Auly Soroti Kebijakan Fiskal Pemerintah Tahun 2021

Kami harap Pemerintah fokus pada penanganan Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat

## Ir. H. A. JUNAIDI AULY, M.M.

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (16/06) — Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2021 kepada DPR RI. Dokumen tersebut digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2021.

Terkait hal itu, Fraksi PKS DPR RI memiliki beberapa catatan penting dalam menyikapi ini.

Fraksi PKS mendorong Pemerintah harus mengestimasikan bahwa APBN kedepan disusun

secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi di tengah tantangan pandemi covid-19 dan resesi ekonomi global.

Junaidi Auly, selaku Anggota DPR RI Komisi XI dari Fraksi PKS mengatakan dalam KEM-PPKF 2021 masih membutuhkan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan pandemi covid-19.

"Kami harap Pemerintah fokus pada penanganan Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang

lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat," ujar Junaidi di Senayan, Selasa (16/06).

Beberapa catatan PKS diantaranya, pertama target pertumbuhan ekonomi dalam KEM-PPKF tahun 2021 dinilai masih terlalu rendah hanya 4,5-5,5 persen, padahal dalam RPJMN 2020-2024 ekonomi ditargetkan bisa tumbuh 5,4-6 persen per tahunnya. Pada 2021, level pertumbuhan untuk skenario rendah mencapai 5,4 persen, level sedang mencapai 5,5 persen, dan level tinggi 5,7 persen.

"Kami mengingatkan kepada pemerintah untuk tetap fokus pada pencapaian target-target ekonomi dan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024, terlebih di tengah krisis pandemi covid-19 dimana rakyat membutuhkan kerja keras pemerintah," pungkas Junaidi.

Catatan kedua, Fraksi PKS mendorong pemerintah untuk



mampu mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan, pertumbuhan ekonomi 2021 harus dapat dipacu lebih tinggi yang diikuti dengan perbaikan kualitas.

"Selama ini, pemerintah selalu gagal mencapai target dengan cenderung menyalahkan faktor gejala ekonomi global. Tahun 2019 lalu ekonomi hanya tumbuh 5,02 persen dari target 5,3 persen, 2018 realisasi pertumbuhan 5,17 persen dari target 5,4 persen", paparnya.

Kegagalan capaian pertumbuhan ekonomi ini, lanjutnya, tentu akan berdampak pada kegagalan target penerimaan negara maupun percepatan penurunan masalah-masalah sosial di Indonesia.

Selanjutnya, Fraksi PKS mendesak pemerintah untuk merinci secara detail target pertumbuhan dari sisi permintaan. Dalam dokumen KEM-PPKF 2021 tidak dirinci pertumbuhan konsumsi rumah tangga, padahal pertumbuhan pada sektor ini memberikan gambaran kemampuan perekonomian yang mencapai target pertumbuhan ekonomi dilihat dari kontribusi konsumsi rumah tangga sekitar 56 persen.

"Pada 2021 pemerintah menargetkan 4,1-4,9 persen pertumbuhan konsumsi rumah tangga, kami menilai pemerintah tidak bersungguhsungguh berupaya mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi melihat dari rendahnya target pada sektor ini," tutup Junaidi.

## Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

# Anis Minta OJK Berpihak pada UMKM

Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional. Dan sumbangan terhadap PDB (product domestic bruto) pada tahun 2019 mencapai 60,34 persen. Apakah program untuk UMKM hanya relaksasi kredit untuk nilai kredit dibawah 10 Milyar dengan penundaan cicilan satu tahun, atau adakah program lain?

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Komisi XI DPR RI

Jakarta (17/06) — Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang saat ini membutuhkan anggaran hampir Rp 700 Triliun, mendapat tanggapan dari Anggota Komisi XI Fraksi PKS DPR RI, Anis Byarwati.

Berdasarkan pernyataan yang disampaikan Menteri Keuangan dalam Rakornas Internal Pemerintah Tahun 2020, Senin (15/06/2020) lalu, dana pemulihan ekonomi yang dibutuhkan saat ini sebesar Rp 686 triliun.

Nilai ini membengkak dari anggaran sebelumnya senilai Rp 677,2 triliun. Alokasi

anggaran tersebut yaitu untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 598 triliun dan biaya kesehatan senilai Rp 88 triliun.

Menkeu menjelaskan anggaran pemulihan ekonomi akan terus bergerak mengingat dampak corona virus disease 2019 (Covid-19) yang terus dinamis.

Dari jumlah anggaran tersebut, Anis mengkritisi alokasi anggaran yang diberikan untuk UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah).

Menurut Anis, UMKM mempunyai peran penting dan

strategis di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Anis kemudian mengutip data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit.

Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa.

Secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, dan Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% tenaga kerja nasional. Dan sumbangan terhadap PDB (product domestic bruto) pada tahun 2019 mencapai 60,34 persen.

Sementara itu data Kemkominfo menyebutkan bahwa pada tahun 2018 sebanyak 9,61 juta unit umkm sudah memanfaatkan platform online.

Lebih spesifik, politisi senior PKS ini mempertanyakan keberpihakan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dalam program yang digulirkan untuk UMKM.



“Apakah program untuk UMKM hanya relaksasi kredit untuk nilai kredit dibawah 10 Milyar dengan penundaan cicilan satu tahun, atau adakah program lain?” tanya Anis.

Anggota DPR dari dapil Jakarta Timur ini juga mengingatkan OJK untuk memperhatikan keberpihakannya kepada rakyat kecil melalui kebijakan untuk UMKM.

Hal ini didasari dengan mengingat kontribusi UMKM terhadap perekonomian

nasional yang sangat besar.

“Sehingga kenaikan anggaran pemulihan ekonomi yang demikian besar tidak hanya dirasakan oleh korporasi,” ujarnya.

Masih seputar isu ekonomi nasional, Anis juga menyoroti sikap BPK yang mengungkapkan kepada publik mengenai kelemahan OJK dalam pengawasan terhadap 7 bank.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id



## Dr. H. Mulyanto, M.Eng

Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS

RUU HIP, Begini kronologinya:

- 1 Pleno Baleg: menerima dengan catatan.
- 2 Ternyata tetap tidak berubah, maka PKS **MENOLAK** dgn **TIDAK** menandatangani draft RUU HIP.



- 3 Di **BAMUS**, kembali PKS **MENOLAK**.
- 4 Terakhir final di **PARIPURNA**, PKS **MENOLAK** RUU HIP ini.
- 5 Ke depan? Kita selalu bersama ummat.

## Dukung Penguatan Fungsi Media pada RUU OL

# Aleg PKS: Media Penegak Kebenaran dan Keadilan

Para pemilik media harus menyadari bahwa media komunikasi memiliki prinsip utama yaitu frekwensi itu milik publik, keselamatan publik, kepentingan publik, kepedulian publik, dan kesejahteraan publik. Tidak peduli berapa banyak frekwensi yang mereka kuasai

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag., M.Si**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (13/06) — Anggota Panja DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati mengutip pernyataan Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Dharmajaya, tentang fungsi pers sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut memperjuangkan penegakkan keadilan dan kebenaran (Pasal 3 UU No.40/1999 tentang Pers), dalam RDPU Panja RUU Cipta Kerja dengan Dewan Pers, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Irwansyah (akademisi dari UI) terkait dengan Permasalahan Media, Kamis, (11/6/2020).

Anis memberikan peneka-

nada pada fungsi kontrol sosial dan ikut memperjuangkan keadilan dan kebenaran, yang menjadi dasar untuk mendukung kebebasan pers.

Menurut Anis, pers yang bebas tidak terpasang bisa menjadi pilar untuk memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.

Dalam rapat ini, Irwansyah (akademisi UI) menyampaikan hasil survey 2018 tentang kedudukan media yang dijadikan referensi publik dalam mencari informasi, yang menyebutkan bahwa dari 28 negara yang di survey, Indonesia menempati urutan ke-2 setelah Tiongkok.

Ini artinya bahwa 68% masyarakat Indonesia masih menaruh kepercayaan kepada media.

Menanggapi hasil survey ini, Anis mengatakan bahwa masyarakat kita masih mengandalkan media sebagai sumber informasi dan pengetahuannya.

"Ini harus menjadi pengingat agar media selalu memberikan informasi yang benar dan akurat," katanya.

"Ada tanggung jawab besar pada media untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat," tambahnya.

Data selanjutnya menyebutkan bahwa televisi masih menjadi pilihan konsumsi media bagi 89% milenial di Indonesia.

Mengingat komposisi demografi Indonesia ke depan akan didominasi generasi milenial, maka peran televisi dalam memberikan edukasi dan informasi kepada generasi milenial, menjadi sangat penting.

Legislator dari Fraksi PKS ini kemudian menyampaikan bahwa PKS secara umum menyetujui dan mengapresiasi apa yang disampaikan oleh perwakilan insan pers pada



RDPU ini.

Menanggapi usulan dihapuskannya beberapa pasal (diantaranya pasal 11 dan 18), Anis menyatakan PKS akan melakukan kajian dan mempelajarinya lebih lanjut. Pasal-pasal ini terkait dengan keterlibatan penanaman modal asing dan masalah sanksi.

"Mungkin ada pasal yang harus di drop dan ada yang harus dibuat norma baru," ungkapnya.

Anis berharap, pers dapat memerankan fungsinya sebagai wadah informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta ikut memperjuangkan penegakan keadilan dan kebenaran.

Anis juga berharap, Baleb dapat menyepakati jati diri pers yang bisa mengatur dirinya sendiri (memiliki self regulatory), dengan tetap mempertimbangkan 5 prinsip utama media komunikasi yaitu frekwensi milik publik (public domain), keselamatan publik (public safety), kepentingan publik (public interest), kepedulian publik (public care) dan kesejahteraan publik (public welfare).

Politisi senior PKS ini juga mengingatkan para pemilik media agar memperhatikan 5 prinsip utama tersebut.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# Anggota Baleg Fraksi PKS Tolak Ikut Pembahasan RUU HIP

Fraksi PKS tidak ingin jadi bagian dari lahirnya Undang-Undang haluan ideologi negara yang menyempitkan Pancasila menjadi Trisila, atau bahkan Ekasila. Ini tidak sesuai dengan Pancasila yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945,"

## Dr. H. MULYANTO, M.Eng

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (08/06) — Usai disahkan sebagai Rancangan Undang-Undang (RUU) Inisiatif DPR RI, selanjutnya RUU Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) akan dibahas bersama Pemerintah di tahun 2020 ini.

Anggota Badan Legislasi DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, menyebut besar kemungkinan PKS menolak ikut pembahasan, karena RUU HIP ini tidak memasukkan TAP MPRS XXV/1966 tentang pelarangan penyebaran ideologi Komunisme, Marxisme dan Leninisme di dalam

konsiderannya.

"Fraksi PKS tidak ingin jadi bagian dari lahirnya Undang-Undang haluan ideologi negara yang menyempitkan Pancasila menjadi Trisila, atau bahkan Ekasila. Ini tidak sesuai dengan Pancasila yang sah sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945," ungkap Mulyanto.

Di dalam UUD tahun 1945 tidak dikenal sila ketiga 'Ketuhanan Yang Berkebudayaan'. Yang ada adalah Sila Pertama, ruh dari sila-sila lainnya dari Pancasila,

yakni 'Ketuhanan Yang Maha Esa'.

"Secara prinsip PKS berupaya agar TAP MPRS XXV/1966 itu dimasukkan kedalam konsideran 'mengingat' dalam RUU HIP. Fraksi PKS aktif membangun komunikasi dengan anggota Baleg dari Fraksi lain, terutama Anggota Fraksi Partai berbasis massa Islam dan nasionalis sejati untuk bersama-sama menghadirkan ruh sebenarnya dari ideologi Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa dan menolak ajaran-ajaran ideologi lain yang menentang keberadaan Tuhan," ujar Mulyanto dalam acara diskusi daring, Ahad (07/06/2020).

Selain Mulyanto, dari DPR RI hadir Dr. Sodik Mudjahid. Diskusi ini juga menghadirkan Ketua dan Ketua Dewan Pakar Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS) K.H. Athian Ali dan Prof. Atip Latipulhayat, SH., LL.M, Ph.D. serta Dr. H. Abdul Chair Ramadhan (HRS Center); Prof. Dr. Asep Warlan Yusuf, dan M. Rizal Fadillah.



Dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Aliansi Nasional Anti-Syiah (ANNAS), Mulyanto mengajak masyarakat untuk aktif mengkritisi isi RUU HIP tersebut dan aktif menyampaikan aspirasi serta pandangan mereka kepada pemerintah dan wakil rakyat yang akan membahas RUU HIP baik secara langsung ataupun melalui media massa.

Menurut Mulyanto RUU HIP ini sangat penting diperhatikan karena akan menjadi acuan utama dalam mendefinisikan dan memaknai nilai-nilai Pancasila.

"Jangan sampai Pancasila ditafsirkan secara tertutup dan diindoktrinasi kepada masyarakat oleh penguasa

untuk kepentingan rezim," terangnya.

Sebelumnya Fraksi PKS, kata Mulyanto, mengikuti proses pembahasan RUU HIP ini. Meskipun secara politik suara PKS relatif kecil dibandingkan suara partai koalisi pendukung Pemerintah, namun Fraksi PKS terus memperjuangkan aspirasi masyarakat agar lebih diperhatikan.

"Fraksi PKS akan megerahkan berbagai upaya dan pendekatan agar RUU HIP ini tidak dijadikan pintu masuk berkembangnya paham komunisme, marxisme dan leninisme di Indonesia," pungkas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.

## RUU HIP Banyak Ditolak Publik

# Bukhori : Kami Sudah Menolak Sejak Awal

“Kami, dari Fraksi PKS, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi (red:penolakan) yang disampaikan. Sikap publik ini sebenarnya sejalan dengan sikap kami di awal yang telah menolak RUU HIP. Sebab, sedari awal kami menilai bahwa RUU ini belum mengakomodir aspirasi publik sepenuhnya”

### **KH. BUKHORI, Lc., M.A.**

Anggota Badan Legislasi DPR RI

Jakarta (15/06) — Draft RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) menuai banyak protes dari sejumlah ormas Islam. Sejumlah ormas Islam yang telah menyampaikan penolakannya antara lain PBNU, Muhammadiyah, MUI, dan FPI.

Tidak hanya ormas Islam, ormas lain seperti Pemuda Pancasila juga turut menyampaikan penolakannya. Sikap tersebut terjadi lantaran

dalam salah satu pasal di RUU tersebut menegaskan norma Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 7 RUU HIP dituliskan : Pertama, Ciri pokok Pancasila adalah keadilan dan kesejahteraan sosial dengan semangat kekeluargaan yang merupakan perpaduan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan/demokrasi politik dan ekonomi dalam satu kesatuan.

Kedua, Ciri Pokok Pancasila berupa trisila, yaitu: sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan.

Ketiga, Trisila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terkristalisasi dalam ekasila, yaitu gotong-royong.

Selain menegaskan sila pertama Pancasila, RUU ini juga tidak memasukan TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam konsideran di draf RUU tersebut.

Dengan tidak memasukan TAP MPRS tersebut dikhawatirkan akan menjadi entry point bagi bangkitnya paham komunisme di Indonesia.

Menanggapi perkembangan tersebut, Anggota Baleg DPR RI Fraksi PKS, Bukhori Yusuf, menyambut positif konstelasi yang terjadi sekaligus menyatakan terima kasih kepada publik yang menolak RUU HIP tersebut.

Bukhori menambahkan, Fraksi PKS di DPR sejak awal telah menyuarakan penolakan terhadap RUU HIP dengan beberapa catatan.

“Kami, dari Fraksi PKS, menyambut baik dan mengucapkan terima kasih atas aspirasi (red:penolakan) yang disampaikan. Sikap publik ini sebenarnya sejalan dengan sikap kami di awal yang telah menolak RUU HIP. Sebab, sedari



awal kami menilai bahwa RUU ini belum mengakomodir aspirasi publik sepenuhnya” ungkap Bukhori di Jakarta, (15/06)

Pada sidang paripurna 12 Mei 2020 lalu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI menolak penetapan Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang mengabaikan konstitusi TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme/marxisme-leninisme.

Berkaitan dengan pembahasan RUU HIP tersebut, lanjut Bukhori, Fraksi PKS juga telah memberikan beberapa catatan

penting, Pertama, Fraksi PKS menilai Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila yang diatur didalam RUU ini, diharapkan dapat membentuk manusia Indonesia yang memiliki daya cipta, rasa, karsa, karya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan mencintai ilmu pengetahuan, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara dapat menghantarkan Indonesia untuk mencapai cita-cita nasional menjadi bangsa dan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur sebagai berkat dan rahmat Allah Yang Maha Kuasa, sebagaimana terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selengkapnya di fraksi.pks.id

## Soal Nasib RUU HIP

# Baleg DPR RI Harus Pertimbangkan Penolakan Publik

berdasarkan catatan Fraksi PKS saat rapat di Baleg agar TAP MPRS no XXV/1966 di masukkan dalam konsideran, dan agar dicabutnya pasal yang menyebut trisila, ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan dan lainnya ternyata tidak diakomodasi.

### Dr. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A

Wakil Ketua MPR RI

Jakarta (16/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebutkan bahwa Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) yang dalam penetapannya sebagai RUU inisiatif DPR juga kontroversial, ternyata mendapatkan penyikapan kritis dan bahkan penolakan dari berbagai kelompok masyarakat.

Wakil Ketua MPR RI ini juga mengatakan berdasarkan catatan Fraksi PKS saat rapat di Baleg agar TAP MPRS no XXV/1966 dimasukkan dalam

konsideran, dan agar dicabutnya pasal yang menyebut trisila, ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan dan lainnya ternyata tidak diakomodasi.

"Sehingga saat di Rapat Paripurna PKS dengan tegas menyatakan menolak dengan catatan terhadap RUU HIP tersebut," tegas pria yang akrab disapa HNW ini.

Belakangan, lanjut HNW, memang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) selaku pengusul awal RUU itu akhirnya berubah dan setuju

memasukkan TAP MPRS No XXV/1996 yang mengatur larangan komunisme sebagai konsiderans dan menghapus Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) yang memunculkan kembali istilah Pancasila Trisila, Ekasila dan Ketuhanan yang berkebudayaan.

"Dengan akhirnya PDIP berubah dan setuju dimasukkannya TAP MPRS No XXV/1966 soal PKI sebagai Partai terlarang dan larangan penyebaran dan pengajaran komunisme ke dalam konsideran," pungkash HNW.

Mengingat RUU HIP, katanya, maka semua Fraksi di DPR secara terbuka sepakat untuk masih tetap berlakunya ketentuan hukum bahwa PKI adalah Partai terlarang, dan juga larangan penyebaran dan pengajaran komunisme, marxisme dan leninisme.

"Dan dengan PDIP menerima masuknya TAP MPRS noXXV/1966 dalam konsideran RUU HIP, maka tidak ada lagi Fraksi di DPR yang menolak dimasukkannya TAP MPRS no XXV/1966 ke dalam RUU HIP," paparnya.

Tetapi, kata HNW, Publik sudah menyikapi sangat kritis terhadap RUU HIP ini, bukan lagi hanya soal tak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966, juga 'kecolongan' penyebutan trisila dan ekasila.

"Namun masalah-masalah dalam RUU HIP ini mereka dapatkan tersebar di beberapa



pasal, yakni seperti yang ada Pasal 4, 5, 6 dan 8 RUU itu," tukasnya dalam siaran pers di Jakarta, Senin (15/06/2020).

Hidayat yang akrab disapa HNW menuturkan bahwa kepada Baleg DPR RI harus memperhatikan suara Rakyat ini. Sehingga kalaupun RUU HIP itu tetap akan dibahas maka perlu ada perombakan yang mendasar dalam batang tubuh maupun naskah akademiknya.

"Larangan Komunisme serta Pancasila yang bukan Trisila atau Ekasila itu seharusnya tidak hanya ditempelkan ke dalam konsiderans, tetapi juga benar-benar tergambar dalam norma batang tubuh RUU itu," ujarnya.

Menurut HNW, hal ini sejalan dengan penolakan atau kritik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Purnawirawan TNI/Polri dan berbagai Ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang menolak RUU itu.

"Selain MUI, NU, Muhammadiyah, DDII, Persis, para Pakar, ICMI, bahkan Purnawirawan TNI/Polri dan kelompok-kelompok masyarakat lain juga menolak secara terbuka RUU HIP ini, antara lain karena tidak dicantumkannya sejak awal TAP MPRS no XXV/1966," terangnya.

Selengkapnya kunjungi fraksi.pks.id

# BKSAP: Lawan Aneksasi Israel atas Tanah Palestina

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia menginisiasi gerakan pemboikotan Internasional dalam forum-forum Global terhadap Israel yang berencana mempercepat ‘Kesepakatan Abad ini’,”

**Dr. H. MARDANI, M.Eng**

Wakil Ketua BKSAP DPR RI

Jakarta (10/06) — Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mendesak Pemerintah untuk membuat gerakan Internasional melawan Israel yang berencana menjalankan rencana

‘Kesepakatan Abad usulan Donald Trump’ melalui blokade Jalur Gaza, pendudukan Masjid Al Aqso dan aneksasi lebih dari 30 persen wilayah Tepi Barat.

“Saya mendesak Pemerintah Indonesia menginisiasi gerakan pemboikotan Internasional dalam forum-forum Global terhadap Israel yang berencana mempercepat ‘Kesepakatan Abad ini’,” kata Mardani, Rabu (10/06).

Lebih lanjut, Anggota Fraksi PKS itu menganggap usulan Trump dapat merusak stabilitas keamanan dan perdamaian

antara Palestina-Israel.

“Ini bisa buat panas lagi suhu negara-negara di Timur Tengah, tidak hanya mencaplok wilayah Tepi Barat tapi juga lembah Jordan buat kepentingan pragmatis pembangunan pemukiman ilegalnya,” ujar Mardani.

Mardani juga mengapresiasi Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI yang telah menyurati 30 negara untuk bersama menolak rencana Israel mempercepat rencana ‘Kesepakatan abad ini’.

“Respon pemerintah luar biasa, tapi saya berharap pemerintah tidak boleh hanya sebatas ini, harus sampai buat gerakan negara-negara memutus hubungan dengan Israel dari segi diplomasi, ekonomi, teknologi dan sebagainya,” tutur Mardani.

Terakhir Mardani meng-

ajak seluruh masyarakat bantu perjuangan rakyat Palestina yang sudah sejak lagi tindas oleh Israel dan sekutunya.

“Mari kita tingkatkan ikhtiar kita melalui doa-doa dan harta agar Allah SWT mempercepat kemerdekaan Palestina dari Penjajahan modern Israel dan Sekutunya,” pungkasnya.

Sebelumnya, kelompok perjuangan Palestina Hamas menyurati Presiden Indonesia Joko Widodo terkait aksi pencaplokan wilayah yang terus dilakukan Israel di tengah pandemi Covid-19.

Dalam surat tersebut, Kepala Biro Politik Hamas Ismail Haniyeh mengatakan Israel memanfaatkan isu Covid-19 untuk terus memperluas pemukiman ilegalnya dan mempercepat rencana ‘Kesepakatan Abad Ini,’” tutup Mardani.



## Interupsi Sidang Paripurna DPR

# Fraksi PKS Minta Pemerintah Tetapkan Target APBN Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Rakyat

Fraksi PKS memandang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 perlu didesain lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga sila ke-5 Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat terwujud,”

### H. ECKY AWAL MUGHARAM

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI

Jakarta (15/06) — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang Keempat tahun 2019-2020, menyampaikan sikap pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM & PPKF) Tahun 2021 yang telah disampaikan Pemerintah kepada DPR pada Rapat Paripurna DPR-RI Tanggal 12 Mei 2020.

Perwakilan Fraksi PKS Ecky Awal Mugharam mengingatkan bahwa hasil pembahasan KEM-PPKF Tahun

2021 akan menjadi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2021, sehingga harus benar-benar dicermati arah politik anggaran negara yang ada didalamnya.

“Politik anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa APBN ke depan disusun secara kredibel dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat sebagaimana dimandatkan oleh konstitusi di tengah tantangan Pandemi Covid-19 dan kondisi resesi ekonomi global,” papar Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Ekonomi dan Keuangan ini.

Selain itu, Lanjut Ecky, pandemi Covid-19 memberikan tantangan baru terhadap kondisi ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan ke pertahanan dan keamanan negara. Di bidang kesehatan, ribuan jiwa terkonfirmasi Covid-19 dan ribuan yang meninggal. Di bidang ekonomi, Pandemi Covid-19 telah mengakibatkan turunnya pertumbuhan ekonomi baik di sisi supply maupun demand, meningkatnya jumlah pemutusan hubungan kerja dan jumlah pengangguran, serta meningkatnya jumlah rakyat miskin.

“Fraksi PKS mengingatkan pemerintah bahwa Pemulihan ekonomi nasional dapat efektif dan signifikan berhasil ketika Penanganan krisis kesehatan telah dilalui. Fraksi PKS juga mengingatkan Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang tepat dan tidak membahayakan rakyat”, terangnya.

Secara umum, Anggota Komisi XI DPR RI ini menyatakan, Fraksi PKS memandang bahwa dalam KEM dan PPKF Tahun 2021 masih membutuh-



kan penajaman kebijakan dalam upaya penanganan Pandemi Covid-19, mendorong pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, meningkatkan lapangan kerja, mengurangi kesenjangan, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 Pasal 23 Ayat 1. “Fraksi PKS memandang Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021 perlu didesain lebih kredibel untuk memberikan dampak yang lebih optimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Sehingga sila ke-5 Pancasila, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dapat terwujud,” tandasnya. pks.id

Halal Bi Halal di Dapil Jakarta Timur

# Anis Byarwati Sampaikan Tiga Hal Penting bagi Warga

pentingnya menjaga kesatuan tujuan, kesatuan pemahaman, kesatuan semangat dan kesatuan langkah, dalam menghadirkan Jakarta yang lebih baik. Tanpa adanya kesatuan di atas, cita cita perjuangan tidak akan bisa diraih dengan maksimal

**Dr. Hj. ANIS BYARWATI, S.Ag.,M.Si**

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil DKI Jakarta I

Jakarta (07/06) — Dewan Pimpinan Cabang PKS Kecamatan Cipayang mengadakan acara halal bi halal secara virtual pada hari Minggu, (07/06).

Sejumlah tokoh yang hadir pada acara ini diantaranya: Bapak Wawa Kartiwa (wakil camat Cipayang), Ustadz Hasan Basri (tokoh masyarakat), Dr. Anis Byarwati (anggota DPR RI Fraksi PKS), M. Taufik Zulkifli, M. Thamrin serta Umi Kulsum (anggota DPRD DKI Jakarta).

Dalam kesempatan ini, Anis yang kini bertugas sebagai anggota komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS menyampaikan rasa terima kasih, apresiasi dan dukungannya terhadap acara ini.

Dalam pesan halal bi halal yang disampaikan, Anis mengingatkan kembali pentingnya menjaga kesatuan tujuan, kesatuan pemahaman, kesatuan semangat dan kesatuan langkah, dalam menghadirkan Jakarta yang lebih baik.

"Tanpa adanya kesatuan di atas, cita cita perjuangan tidak akan bisa diraih dengan maksimal," pesannya.

Anis juga menekankan tiga hal yang harus dipegang teguh dalam menjalankan amanah yang diberikan Allah SWT.

"Pertama yaitu ikhlas niat karena Allah SWT yang bermakna bahwa seluruh daya upaya, usaha dan perjuangan

yang dilakukan, dalam rangka beribadah kepada Allah SWT," ungkapnya.

Kedua, lanjut Anis adalah profesional dalam menjalankan seluruh tugas, berusaha memberikan yang terbaik dan bukan ala kadarnya.

"Ketiga adalah kerja tuntas, tidak meninggalkan pekerjaan yang belum selesai", imbuhnya.

Sebagai penutup, Anis menegaskan bahwa ketiga hal tersebut, harus disinergikan dalam koordinasi tim yang baik dan kerja yang berkesinambungan.



Reses di Masjid At Taqwa Cirebon

# Netty Inspeksi Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru

Saya berharap Masjid At Taqwa menjadi standar dan model pengelolaan masjid yang aman dan tertib dimasa pandemi ini, khususnya kota Cirebon. Kita harus pastikan bahwa masjid tidak menjadi mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19,

**Dr. Hj. NETTY PRASETIYANI, M.Si**

Anggota Komisi IX DPR RI

Cirebon (15/06) — Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetyani Heryawan melakukan kunjungan dan inspeksi penatalaksanaan protokol kesehatan dalam rangka Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) di Masjid At-Taqwa, Kota Cirebon, Jum'at (12/06/2020).

Dalam kunjungan tersebut, Netty selaku Ketua Tim Covid-19 Fraksi PKS didampingi Ketua DKM Masjid At-Taqwa Ahmad Yani, dan ketua DMI Kota Cirebon, Rokhadin.

Netty Aher mengapresiasi persiapan dan tata laksana protokol kesehatan untuk sholat Jum'at yang dilakukan di Masjid

At-Taqwa.

"Dibukanya kembali masjid untuk pelaksanaan shalat Jum'at tentu menggembirakan umat Islam yang sudah lama merindu mesjid. Pengelola harus tanggap dan serius dalam menyiapkan penatalaksanaannya mulai dari penggunaan masker, cek suhu, penyediaan hand sanitizer hingga pengaturan shaf yang memperhatikan jarak fisik antar jama'ah," ungkapnya.

Netty menambahkan pihak DKM harus memastikan agar anak-anak dan lansia tidak perlu ikut ke mesjid sampai keadaan aman.

"Saya berharap Masjid At Taqwa menjadi standar dan model pengelolaan masjid yang aman dan tertib dimasa pandemi ini, khususnya kota Cirebon. Kita harus pastikan bahwa masjid tidak menjadi mata rantai penularan dan penyebaran Covid-19," ujarnya.

Selain itu, Netty juga meminta kerjasama dan partisipasi masyarakat yang baik, dalam penatalaksanaan protokol kesehatan.

"Jangan ke masjid jika merasa sakit atau kurang sehat, selalu gunakan masker dan keluar masuk mesjid dengan tertib, jaga jarak antrian dan segera pulang ke rumah jika ibadah telah selesai dilakukan," katanya.

Mengakhiri pernyataannya, Netty menegaskan tanpa kerjasama dan partisipasi positif dari masyarakat, maka kerja pengelolaan menyiapkan protokol kesehatan menjadi sia-sia.



## Kunjungi Korban Banjir Rob di Karawang

# Syaikhu: Pemda Harus Relokasi Warga

Sebagian masyarakat sudah bersedia. Pemkab harus segera menindaklanjuti

### H. AHMAD SYAIKHU

Anggota Komisi V DPR RI

Karawang (09/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Syaikhu mengunjungi korban banjir di Desa Cemara Jaya, Kecamatan Cibuaya, Karawang, Sabtu, (06/06/2020).

Selain memberikan bantuan sembako untuk dapur umum, Politisi PKS itu juga meminta Pemkab Karawang segera merelokasi warga.

"Ini harus segera relokasinya. Warga sudah sering mengalami banjir rob semacam ini," ujar Syaikhu.

Anggota Komisi V DPR RI itu berharap Pemkab Karawang cepat mengajukan usulan relokasi tersebut. Nantinya, Syaikhu akan memperjuangkan usulan Rumah Layak Huni tersebut di DPR kepada Kementerian PUPR.

"Ajukan segera. Komisi

saya kebetulan bermitra dengan Kementerian PUPR. Insya Allah siap saya perjuangkan," ungkap Syaikhu.

Dari dialog yang dilakukan dengan masyarakat, sebagian dari mereka sudah bersedia jika direlokasi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Karawang.

"Sebagian masyarakat sudah bersedia. Pemkab harus segera menindaklanjuti," harap Syaikhu.

Dari hasil tinjauan di lapangan, Syaikhu melihat rumah-rumah tersebut memang tidak layak. Posisi sebagian rumah langsung berada di bibir pantai.

Selain relokasi, upaya lain yang harus dilakukan adalah dengan membuat pemecah gelombang, sehingga ombak

tidak langsung menerjang rumah. Juga dengan menghidupkan hutan mangrove.

Dampak banjir rob ini memang besar. Ada 206 KK dan 489 jiwa yang terdampak, 83 rumah rusak berat, 53 rusak sedang, dan 45 rusak ringan.

Syaikhu mengunjungi warga yang menjadi korban bersama Ketua Fraksi PKS DPRD Karawang Dedi Sudrajat, Anggota Komisi IV DPRD Karawang Maman Suherman, dan Pengurus DPC PKS se-Dapil 3 (Cibuaya, Tirtajaya, Pedes, Pakis dan Tirtajaya), lurah dan aparaturnya setempat. Dalam kunjungan tersebut, Syaikhu memberikan bantuan sembako untuk keperluan dapur umum.

DPD PKS Kabupaten Karawang sejak awal sudah membuat dapur umum di lokasi pengungsian warga.

"Sampai tadi malam sudah lebih 700 nasi bungkus habis di dapur umum untuk warga terdampak Abrasi (ROB)," ujar Ketua DPD PKS Kabupaten Karawang Dedi Sudrajat.



## Kunjungan ke RSUD

# Rofik Bagikan APD dan Pantau Perkembangan Penanganan Covid-19

“Saya atas nama pribadi, PKS dan masyarakat pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat dan tenaga medis atas dedikasi yang luar biasa dalam penanganan pasien covid-19, sehingga pasien yang ada, satu persatu dapat sembuh

## H. ROFIK HANANTO, S.E

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Jateng VII

Purbalingga (08/06) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Dapil Jawa Tengah VII, Rofik Hananto, melakukan kunjungan kerja ke Puskesmas dan Rumah Sakit rujukan Covid-19.

Rofik didampingi oleh Anggota DPRD Kab. Purbalingga FPKS; Aris Widiarso berkunjung ke RSUD Panti Nugroho dan Puskesmas Purbalingga, di RSUD Panti Nugroho Rofik disambut langsung oleh Direktur Rumah Sakit, dr. Yusi Febrianto, dan

diajak melihat kondisi ruang isolasi untuk penanganan pasien covid-19 di rumah sakit ini.

“Alhamdulillah kita mendapat kabar gembira. Dari 10 pasien Covid-19 yang dirawat di RSUD ini sekarang tinggal 1 pasien. 9 diantaranya dinyatakan sembuh dan sudah diperbolehkan pulang. 10 pasien berasal dari Klaster Gowa sebanyak 6 orang dan Klaster Lembang 4 pasien. Tinggal 1 pasien dari Klaster

Gowa yang masih dalam perawatan.” kata Rofik.

Managemen RSUD Panti Nugroho mengucapkan terima kasih atas kepedulian anggota DPR RI asal Purbalingga ini.

“Kami ucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pak Rofik dan keluarga besar PKS atas kepeduliannya selama ini, bantuan dari PKS sangat membantu kami. PKS menjadi partai pertama dan satu-satunya yang selama ini memberikan bantuan untuk penanganan pasien Covid-19 di Rumah Sakit ini, kepedulian ini sungguh membuat kami merasa tidak sendiri.” Kata dr. Yusi

“RSUD Panti Nugroho adalah rumah sakit pertama di Purbalingga yang menangani pasien covid-19. Dengan segala keterbatasan alhamdulillah kami bisa menangani, dan hari ini tinggal 1 pasien covid-19 yang dirawat di rumah sakit ini.” tambah Direktur RSUD Panti Nugroho.

Dalam kesempatan ini,



Rofik juga kembali mendistribusikan bantuan berupa APD (hazmat dan face shield), handsanitizer dan nutrisi.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian kami sebagai wakil rakyat dan rakyat pada umumnya, dalam membantu penanganan covid-19.” kata Rofik  
Rofik menambahkan: “Hari ini kami membawa Hazmat, Face Shield, Handsanitizer, dan Nutrisi berupa madu, susu kambing dan spirulina, semoga ini dapat membantu dalam penanganan covid-19.”

Selain RSUD Panti Nugroho di hari yang sama, Rofik dan tim juga menyerahkan bantuan ke Puskesmas Kota Purbalingga (sebelah Kantor Perikanan) dan

Puskesmas Bukateja.

Direncanakan sekitar 25 RS dan Puskesmas lain di Kab. Purbalingga, Banjarnegara dan Kebumen juga akan menerima bantuan serupa.

Rofik mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat dan tenaga medis atas dedikasinya.

“Saya atas nama pribadi, PKS dan masyarakat pada umumnya mengucapkan terima kasih kepada para dokter, perawat dan tenaga medis atas dedikasi yang luar biasa dalam penanganan pasien covid-19, sehingga pasien yang ada, satu persatu dapat sembuh.” tutur Rofik  
Selengkapnya di fraksi.pks.id

## Atasi Kesulitan Internet di Daerah Terpencil

# Rafli Kirim Surat ke Telkomsel

Kita harap Pemerintah segera mengatasi kesulitan akses jaringan internet di daerah terpencil, kita sudah surati Provider Telkomsel selaku Anak Perusahaan BUMN yang menyediakan layanan selular agar di bangun tower BTS di Buloh Seuma Aceh Selatan, sesuai permintaan Pemkab setempat

### RAFLI

Anggota Komisi VI DPR RI

Banda Aceh (13/06) — Kemandirian interaksi Era jaringan komunikasi global (Internet) yang terus berkembang tidak seutuhnya dirasakan oleh masyarakat terpencil di Aceh.

Menjawab harapan masyarakat sejumlah daerah di Provinsi Aceh yang mengalami kendala akses Internet, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS asal Aceh Rafli yang mengirim surat ke Anak Perusahaan BUMN, PT Telkomsel.

Surat Politisi PKS tersebut turut memperkuat permintaan pembangunan tower BTS yang sebelumnya dilayangkan Bupati Aceh Selatan, Tgk Amran kepada PT Telkomsel.

Surat yang diberi tembusan Direktur Telkomsel

Pusat itu ditandatangani Rafli sebagai Anggota Komisi VI DPR RI yang juga mitra kerja Kementerian BUMN, pada Jumat (12/06/2020)

Surat tersebut berisi rekomendasi untuk segera ditindaklanjuti pembangunan tower di kawasan Buloh Seuma, Kabupaten Aceh Selatan, salah satu tempat yang selama ini mengeluhkan akses internet.

Rafli juga mengungkapkan sejumlah daerah terpencil lainnya di Aceh yang mengalami kendala akses jaringan internet agar segera diatasi.

"Kita harap Pemerintah segera mengatasi kesulitan akses jaringan internet di daerah terpencil, kita sudah surati Provider Telkomsel selaku

Anak Perusahaan BUMN yang menyediakan layanan selular agar di bangun tower BTS di Buloh Seuma Aceh Selatan, sesuai permintaan Pemkab setempat," ujarnya

Menurut Rafli, Sejumlah daerah terpencil lainnya di Aceh yang mengalami kendala serupa juga perlu mendapat perhatian, lebih lagi kondisi mahasiswa yang saat ini berada dikampung harus melakukan kuliah jarak jauh menggunakan jaringan internet.

"Masih banyak daerah terpencil di Aceh yang belum optimal jaringan internet, kita minta hal ini diatasi. Disisi lain, kondisi sekarang mahasiswa yang kuliah jarak jauh via jaringan internet paling terdampak saat berada dikampungnya," sebut Rafli.

Teknologi Internet sebagai hal yang digandrungi saat ini sudah menjadi kebutuhan primer dalam mengakses informasi dan bisnis era digital

"Masyarakat bisa menggunakan jaringan internet untuk mempromosikan produk lokal dari daerahnya secara optimal. Mari kita manfaatkan teknologi yang terus berkembang ini secara positif", tutup Rafli.



# Mengisi Reses, Ledia Berbagi Pada Komunitas Lansia dan Disabilitas

“Para lansia dan penyandang disabilitas termasuk yang banyak terdampak situasi pandemi covid-19. Padahal di luar masa pandemi pun, para lansia dan penyandang disabilitas seringkali menjadi pihak yang kurang diperhatikan sehingga situasi pandemi ini seolah menjadi double tekanan bagi mereka. Karena itulah maka secara khusus kami mengalokasikan bantuan kali ini buat mereka, para lansia dan penyandang disabilitas

**Hj. LEDIA HANIFA A, S.Si., M.Psi.T**

Anggota Komisi X DPR RI

Bandung (13/06) — Salah satu kegiatan masa reses yang dilakukan oleh Fraksi PKS DPR RI Ledia Hanifa Amaliah adalah berbagi paket sembako kepada Komunitas Lansia dan Disabilitas.

Dengan tetap melakukan langkah protokol kesehatan, ratusan paket sembako tersebut dibagikan kepada perwakilan komunitas yang berasal dari beberapa wilayah di Kota Bandung.

“Para lansia dan penyand

dang disabilitas termasuk yang banyak terdampak situasi pandemi covid-19. Padahal di luar masa pandemi pun, para lansia dan penyandang disabilitas seringkali menjadi pihak yang kurang diperhatikan sehingga situasi pandemi ini seolah menjadi double tekanan bagi mereka. Karena itulah maka secara khusus kami mengalokasikan bantuan kali ini buat mereka, para lansia dan penyandang disabilitas.” jelas Ledia

Salah satu kelompok

lansia yang diberikan bantuan adalah dari Komunitas Lansia Taman Sari.

Ini adalah salah satu contoh komunitas lansia yang produktif. Di masa sebelum pandemi covid 19, mereka secara rutin menyelenggarakan senam lansia dan kumpulan silaturahmi. Kegiatan ini tentu saja mendukung penjagaan kesehatan fisik dan psikologis para lansia karena mereka jadi bergerak, berolahraga sekaligus saling bersilaturahmi. Bahkan saat sedang reses atau kundang tak jarang saya pun hadir dan ikut senam bersama mereka,” kata Sekretaris Fraksi PKS ini.

Sementara itu paket sembako bagi kelompok disabilitas disampaikan Ledia kepada perwakilan dari Komunitas Cerebral Palsy Kota Bandung dan perwakilan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia Kota Bandung.

“Tidak banyak orang yang tahu bahwa keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas membutuhkan biaya hidup sekitar 30 % lebih besar dari keluarga non penyandang disabilitas. Hal ini karena para penyandang disabilitas



memerlukan pendampingan atau sarana prasana khusus dalam menjalani hidup sehari-hari. Maka pandemi Covid-19 yang banyak mengoreksi pendapatan keluarga jelas sangat memukul para keluarga yang memiliki anggota keluarga penyandang disabilitas, terutama keluarga penyandang disabilitas yang tergolong miskin atau rawan miskin karena pandemi ini.” jelas mantan Ketua Panja UU Disabilitas ini pula.

Paket sembako yang diberikan berisi beras, minyak

goreng, gula, mie telur serta kecap. Ledia mengakui ratusan paket sembako yang di salurkan ini memang masih terbatas, baru mencakup sebagian kecil saja dari para lansia dan penyandang disabilitas di Kota Bandung.

“Tapi saya berharap hal ini bisa menjadi pembuka jalan dan pengingat bagi yang mau berbagi di masa pandemi ini. Ada saudara kita dari kelompok lansia dan penyandang disabilitas yang sangat membutuhkan perhatian.” tutupnya

Bekerjasama dengan BUMN

# Nevi Zuairina Adakan Test Swab di Padang dan Bukittinggi

Alhamdulillah di Sumbar sudah 26 ribu yang di test swab atau 0,5 persen dari jumlah penduduk Sumbar. Semua Pihak, Baik legislator, masyarakat dan semua unsur pimpinan daerah sangat mendukung pemerintah pusat maupun daerah agar test swab sebanyak mungkin seperti yang dilakukan negara lain

## Hj. NEVI ZUAIRINA

Anggota Komisi VI DPR RI

Padang (13/06) — Anggota DPR RI Fraksi PKS Nevi Zuairina, bekerjasama dengan BUMN melakukan serangkaian penyaluran bantuan untuk masyarakat Sumatera Barat.

Kali ini Anggota DPR asal Sumatera Barat bersama BNI melakukan kegiatan test Swab sebanyak 2.000 orang di Padang dan Bukittinggi.

Legislator asal Sumatera Barat ini mengatakan, upaya test swab dilakukan secara masif dengan pertimbangan bahwa, WHO telah merilis penularan corona melalui OTG (Orang Tanpa Gejala).

"Test swab sebanyak banyaknya bertujuan untuk mencari OTG yang berkeliraran tanpa masker dimana-mana, kemudian bila ada dugaan reaktif covid-19, dapat langsung ada tindakan cepat berupa isolasi," ungkapnya.

Prinsip test tracing isolasi, lanjutnya, sering dilakukan dan sebanyak mungkin dengan harapan dapat meredakan pandemi covid 19 ini.

"Alhamdulillah di Sumbar sudah 26 ribu yang di test swab atau 0,5 persen dari jumlah penduduk Sumbar. Semua Pihak, Baik legislator,

masyarakat dan semua unsur pimpinan daerah sangat mendukung pemerintah pusat maupun daerah agar test swab sebanyak mungkin seperti yang dilakukan negara lain", ujar Nevi

Data terakhir yang didapatkan dari berbagai sumber, jumlah tes swab yang dilakukan pada penduduk Indonesia secara nasional masih 0,08 persen. Padahal, perbandingan dengan negara-negara lain misalnya dengan Korsel, negara ini sudah melakukan test swab sebanyak 1,2 persen dari Penduduknya.

Saya apresiasi pada pemerintah Sumatera Barat yang telah melakukan test swab lebih tinggi dari nasional yakni 0,5 persen, sedangkan nasional 0,08 persen. Pemeriksaan swab bisa dimana saja kapan saja untuk mencari OTG seperti yang sampai di BIM langsung di swab oleh pemda merupakan langkah baik", ujar dia.

Nevi juga sangat mengapresiasi putra Padang yakni Dokter Andani Eka Putra yang juga Kepala Laboratorium Pusat Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Universitas Andalas,



Padang yang telah menemukan metode pool test yang luar biasa. Sejak penemuan metode pool test diterapkan di Laboratorium Universitas Andalas, kemampuan Laboratorium di Unand meningkat drastis. "Dari hanya 200 sampel sehari menjadi 1.570 per hari", imbuhnya.

Kondisi New Normal yang diganggu pemerintah pusat, lanjut politisi PKS ini, perlu kewaspadaan tingkat tinggi karena infrastruktur kesehatan dan karakter masyarakat Indonesia sangat berbeda-beda tiap daerah. Pasalnya, arah kebijakan pada covid-19 ini

mengarah pada herd immunity, tetapi dukungan protokol kesehatan masih ada kekurangan di berbagai hal serta dukungan vaksin belum ada.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang hingga saat ini terus fokus terhadap penanganan wabah hingga berjuang menyelesaikan terhentinya covid-19 ini. Dukungan Masyarakat dan pemerintah yang satu misi satu tujuan dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, akan mampu mempercepat penyelesaian persoalan wabah ini", tutup Nevi Zuairina.

# Reses, Nur Azizah Terima Keluhan Soal Pelayanan Sertifikat Produk Halal

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kemenag RI perlu segera menetapkan standard desain. Adanya barcode dan aplikasi daftar produk Makanan bersertifikat Halal yang sah dan mudah diakses masyarakat, serta layanan edukasi Halal kepada masyarakat yang komunikatif

## Hj. NUR AZIZAH TAMHID, B.A.,M.A.

Anggota Komisi VIII DPR RI

Depok (12/06) — Anggota DPR RI Komisi VIII dari Fraksi PKS, Nur Azizah Tamhid, menanggapi keluhan masyarakat atas berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) saat reses di Depok, Jawa Barat.

Menurut Nur Azizah, sejumlah warga menyampaikan bahwa sertifikat Produk Makanan Halal di Indonesia tidak lebih baik.

"Masyarakat masih resah dengan makanan berlogo sertifikat Halal yang saat ini beredar tetapi tidak ada barcodenya," kata Nur Azizah.

Nur Azizah menambahkan, konsumen meragukan keaslian sertifikasi produk-produk, khu-

susnya yang menjadi konsumsi rutin harian yang saat ini beredar.

"Di samping itu, masih banyak pula produk makanan yang belum berlabel halal yang dikonsumsi masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim," terangnya.

Tentang Label Sertifikat Makanan Halal, Nur Azizah menegaskan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dan Kemenag RI perlu segera menetapkan standard desain.

"Adanya barcode dan aplikasi daftar produk Makanan bersertifikat Halal yang sah dan mudah diakses masyarakat, serta layanan edukasi Halal

kepada masyarakat yang komunikatif," ungkapnya.

Anggota DPR RI asal Depok ini juga menanggapi banyaknya produk makanan tidak berlabel halal dan dikonsumsi kaum muslimin.

"Berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pasal 4 berbagai 'produk yg masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal' dan PP no. 33/2019 ttg Peraturan Pelaksanaan UU No 23/2014, mulai 17 Oktober 2019, Sertifikat Halal dikeluarkan oleh BPJPH, Kemenag RI, bukan MUI lagi," paparnya.

Namun, lanjutnya, MUI masih berfungsi untuk mengeluarkan Fatwa Halal hasil audit Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), diserahkan ke BPJPH untuk selanjutnya diterbitkan Sertifikat Halal oleh BPJPH. Selain itu, imbuhnya, MUI juga berfungsi untuk mengevaluasi kompetensi SDM dan mengeluarkan sertifikat sebagai Auditor Halal.

"Sebaiknya konsumen muslim sejak 17 Oktober 2019 tidak mengonsumsi makanan yang tidak ada Sertifikat / Label Halal", tutup Nur Azizah



# Reses, Hermanto Berkeliling Salurkan Sembako

Di masa pandemi covid-19 ini, paket pangan tidak bisa diserahkan dengan cara mengumpulkan masyarakat penerima di satu lokasi. Sesuai anjuran pemerintah, kegiatan penyaluran secara simbolis dibuat sederhana guna menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar

## Dr. HERMANTO, S.E., M.M

Anggota Komisi IV DPR RI

Padang (11/06) — Anggota DPR RI Dapil Sumbang 1 Hermanto dalam perjalanan reses perorangannya di dapil menyerahkan langsung secara simbolis paket pangan kepada masyarakat di daerah-daerah yang dikunjungi yang terbentang dari Koto Baru Kabupaten Dharmasraya sampai ke Silaut, kecamatan terjauh di ujung Provinsi Sumbang yang berbatasan dg Prov. Bengkulu.

Setelah paket pangan diserahkan secara simbolis, selanjutnya tim di daerah terkait menyebarkan ke rumah-rumah masyarakat.

"Di masa pandemi covid-19 ini, paket pangan tidak bisa diserahkan dengan cara mengumpulkan masyarakat penerima di satu lokasi. Sesuai anjuran pemerintah, kegiatan penyaluran secara simbolis dibuat sederhana guna menghindari kerumunan massa dalam jumlah besar", papar legislator dari FPKS ini.

Kepada para penerima, Hermanto berharap agar bantuan yang diterima menjadi bermanfaat dan barokah.

"Bermanfaat dan barokah untuk mencegah wabah covid



### TITIK-TITIK PENYALURAN PAKET PANGAN

- 1 SDIT Binaul Ummah, Simpang Blok E Jorong Pandaleh Nagari Sialanggaung Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya
- 2 Mushola Jorong Pasar Tanjung Ampalu Nagari Limo koto Kec. Koto VII, Kabupaten Sijunjung (distribusi untuk Sijunjung dan Sawahlunto)
- 3 Kantor DPD PKS Kota Solok
- 4 TKIT Sa'diyah, Selayo, Kubung, Kabupaten Solok (distribusi untuk Kabupaten Solok, Kota Solok dan Kabupaten Solok Selatan)
- 5 Kelompok Tani Kandih Maju Bersama di Jorong Linjuang Koto Tinggi, Nagari Koto Gaek Gugauk, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok
- 6 Kelompok Tani Hidayatullah di Lurah Ath Jorong Lurah Nan Tigo Nagari Salayo, Kecamatan Kubung Kabupaten Solok
- 7 Butik busana muslim Al-Hidayah, Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar (distribusi untuk Kab. Tanah Datar dan Kota Padang Panjang)
- 8 TPA di Jorong Seberang Air Taman, Nagari Sumpur, Batipuh Selatan, Kab. Tanah Datar
- 9 Kelompok Tani Kabun Gadang, Pandai Sikek, Kec. X Koto, Kab. Tanah Datar
- 10 SDIT Mutiara, Pariaman Tengah, Kota Pariaman
- 11 Pusat Pengolahan Ikan Pasir Jambak, Pasie Nan Tigo, Koto Tangah, Kota Padang (distribusi untuk Kota Padang, Kab. Pesisir Selatan dan Kab. Mentawai)
- 12 Kelompok Tani Koto Duku Kel. Koto Hilalang, Kec. Lubuk Kilangan, Kota Padang yang dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Sumatera Barat Syafrizal
- 13 Kampung Pasar Belakang, Nagari Pasar Tapan, Kec. Basa IV Balai Tapan, Kab. Pesisir Selatan Sabtu 6 Juni 2020 pukul 15.00
- 14 Kampung Sido Mulyo, Nagari Tanah Binjai, Kec. Silaut, Kab. Pesisir Selatan

## Cegah Covid-19 dan Stunting

# KKP dan DPR RI Bagikan 3,5 Ton Ikan di Sukabumi

Bantuan ini dimaksudkan untuk asupan protein ikan yang dapat meningkatkan imunitas masyarakat sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dan stunting

**drh. H. SLAMET**

Anggota Komisi IV DPR RI

Sukabumi (11/06) — Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerjasama dengan mitra kerja Komisi IV DPR RI periode Juni-Oktober 2020, melakukan kegiatan perluasan Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) berupa bantuan ikan/olahan ikan di 110 lokasi yang tersebar 21 provinsi, salah satunya Kota dan Kabupaten Sukabumi.

"Bantuan ini dimaksudkan untuk asupan protein ikan yang dapat meningkatkan imunitas masyarakat sehingga dapat mencegah penyebaran penyakit Covid-19 dan stunting," ucap Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKS (F-PKS) Slamet kepada wartawan, Rabu (10/6/2020).

Slamet menyebut, tujuan kegiatan tersebut juga dalam rangka penanganan stunting, penyerapan produk UKM/pembudidayaan/nelayan dan penanggulangan Covid-19.

"Ikan tersebut diambil dari UKM daerah Ujung Genteng Kabupaten Sukabumi dan UKM Kecamatan Cibeureum Kota Sukabumi agar menyerap produk UKM setempat sekaligus sebagai promosi produk UKM," tambah Slamet.

Slamet menjelaskan, total bantuan ikan segar dan olahan ikan sebanyak 1.000 paket di bagikan kepada warga Kabupaten Sukabumi dan 500 paket untuk warga Kota Sukabumi.

"Gemarikan ini merupakan

program utama untuk membantu sumber daya masyarakat yang cerdas," ujar Slamet.

Sementara itu, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Trisna Ningsih menyampaikan, Sukabumi merupakan salah satu target lokasi intervensi stunting.

Trisna menuturkan, angka stunting Kabupaten Sukabumi pada tahun 2019 sebesar 37,6%, lebih tinggi dari Provinsi Jabar sebesar 29,9%. Hal itu menunjukkan bahwa dari 100 balita di Kabupaten Sukabumi terdapat 37 balita stunting.

Paket Gemarikan tersebut masing-masing berisi 4 jenis ikan dan 1 jenis olahan per paket terdiri dari 1 kilogram ikan layang, 1 kilogram ikan tongkol, 1 kilogram ikan kembung, 1/2 kilogram cumi dan 1 pcs ikan sarden kaleng ukuran 425 gram.

Dalam rangka mencegah penularan Covid-19, pada kegiatan tersebut juga dibagikan sebanyak 5.000 pcs masker ayo makan ikan.

Penerima simbolis diwakili oleh masyarakat Kecamatan



Gunungpuyuh dan wilayah Kota Sukabumi. Adapun kegiatan ini dihadiri juga perwakilan 20 orang dari rukun tetangga, lush dan masyarakat sekitar. Kegiatan tetap mengacu pada protokol kesehatan social distancing.

Bantuan ikan tersebut didistribusi ke 22 kecamatan di Kabupaten sukabumi, yakni Kecamatan Cimanggu, Cibitung, Ciracap, Surade, Jampang Kulon, Ciemas, Lengkong, Cidadap, Cidolog, Jampang Tengah, Purabaya, Sagaranten, Nyalindung, Kebonpedes, Cirenghas, Gegerbitung, Sukaraja, Gunung-guruh, Cibadak, Cisaat, Curug Kembar dan 7 kecamatan di Kota Sukabumi, yakni Kecamatan Cikole, Gunungpuyuh, Warudoyong, Baros, Cibeureum, Lembursitu, dan Citaamiang.

Berdasarkan data Susenas (2018), Angka Konsumsi Ikan (AKI) Kabupaten Sukabumi sebesar 23,24 kilogram per

kapita dan Kota Sukabumi sebesar 18 kilogram per kapita, masih di bawah capaian AKI Provinsi Jawa Barat sebesar 29,64 kilogram per kapita. Apabila melihat angka tersebut masih jauh di bawah capaian AKI Nasional sebesar 50,69 kilogram per kapita.

Kegiatan Safari GEMARIKAN tersebut dilakukan secara singkat, mengacu pada protokol kesehatan dengan rangkaian penyerahan bantuan olahan ikan secara simbolis kepada 5 orang wakil penerima.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi, pihak Dinas Provinsi Jawa Barat yang diwakili Plt Kepala UPTD Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Kabid PSDKP) Wardini Mulatsari, dan Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Trisna Ningsih.

# Masa Reses, Mahfudz Abdurrahman Hadiri Silaturahmi Virtual Warga Bekasi

untuk pembukaan kembali aktifitas perekonomian harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan hati-hati, agar tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID 19. Penerapan protap kesehatan yang sudah dibuat juga harus ditaati, jangan sampai malah kontradiktif serta adanya pengawasan dari pemerintah daerah yang ketat dan tegas

## H. MAHFUDZ ABDURRAHMAN, S.Sos

Anggota Fraksi PKS DPR RI, Depil. Jabar VI

Bekasi (12/06) — Dalam rangka persiapan percepatan ekonomi di era new normal diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat dan cermat.

Membahas tema tersebut, dalam agenda resesnya Anggota DPR RI dari Fraksi PKS, Mahfudz Abdurrahman menghadiri silaturahmi Virtual Warga Bekasi bertema "Strategi Percepatan Pergerakan Ekonomi Era New Normal", Selasa, (09/06/2020).

Kehadiran Mahfudz Abdurrahman sebagai Mitra Komisi VI menjelaskan tentang saran dan

pandangan terkait strategi percepatan roda perekonomian di era new normal yang akan diterapkan di Kota Bekasi.

Selain itu, Mahfudz juga menyampaikan beberapa informasi kebijakan nasional yang berkaitan dengan penerapan new normal di beberapa wilayah yang dijadikan percontohan seperti di Kota Bekasi.

Mahfudz sapaan akrabnya, juga menegaskan bahwa untuk pembukaan kembali aktifitas perekonomian harus dilakukan dengan perencanaan yang tepat dan hati-hati, agar

tidak terjadi lonjakan kasus positif COVID 19.

"Penerapan protap kesehatan yang sudah dibuat juga harus ditaati, jangan sampai malah kontradiktif serta adanya pengawasan dari pemerintah daerah yang ketat dan tegas," imbuhnya.

"Dalam rangka menghadapi masa era new normal ini, banyak hal yang harus kita lakukan sebagai strategi selain meningkatkan kembali roda perekonomian, juga harus diperhatikan keselamatan masyarakatnya. Sehingga perencanaan yang akan dan telah dibuat harus tepat dan hati-hati", papar Mahfudz.

Acara tersebut juga dihadiri narasumber lainnya yakni Walikota Bekasi Rahmat Efendi, Ketua KADIN Kota Bekasi Chaeril Astari, dan Pusat Kajian Manajemen Strategi/PMKS, Siswadi.



Terkait Naiknya Tagihan Listrik

# DPR: PLN Jangan Tambah Beban Rakyat!

Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka akan menambah beban rakyat. Apalagi ini disaat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara

## H. SYAHRUL AIDI MAAZAT, Lc., M.A.

Anggota Komisi V DPR RI

Pekanbaru (06/06) — Tagihan listrik beberapa hari terakhir jadi pembicara publik. Kenai-kannya dinilai di luar kewajaran, hingga mencapai 400% persen.

Kenaikan yang besar itu mengundang protes dari banyak pihak. Salah satunya datang dari anggota DPR RI Fraksi PKS, Syahrul Aidi Maazat yang merespon adanya informasi tersebut.

Syahrul Aidi saat dihubungi pada Jumat (05/06/2020) menyampaikan bahwa menyangkan tindakan PLN yang tiba-tiba menaikkan tagihan listrik tersebut tanpa pemberitahuan kepada pelanggannya.

"Sejak kemarin saya mendapatkan informasi terus menerus dari warga bahwa mereka tagihan listrik mereka naik berkali lipat dari biasanya. Ada yang awalnya 300 ribu, sekarang tiba-tiba menjadi 600 ribu. Bahkan informasinya ada

yang sampai jutaan." kata Syahrul Aidi di ujung telpon.

Dia meminta agar PLN segera memberikan kebenaran informasi atas hal itu. Jika memang informasi itu benar, maka dia sangat menyangkan.

"Kita minta PLN segera memberikan jawaban ke publik. Jika kenaikan yang drastis ini karena disengaja, maka akan menambah beban rakyat. Apalagi ini disaat badai pandemi Covid-19 merusak ekonomi negara" tegas Syahrul Aidi.

Menurut Syahrul Aidi, sebaiknya pemerintah melalui PLN jangan sampai menaikkan semua tarif baik itu listrik, BBM, LPG, atau lainnya di saat ekonomi yang sedang merosot tajam ini dan PLN harus menjadikan UU 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen sebagai panduan untuk pelayanan yang terbaik.

"jangan sampai PLN mengkambing hitamkan WFH di masa Pandemi Covid 19 sebagai acuan kenaikan karena pemakaian over di tengah masyarakat, sehingga lupa menunaikan kewajiban dan memberikan Hak warga sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 UU 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen, bahwasanya konsumen (masyarakat pengguna berhak atas kenyamanan, arus informasi yang benar, di dengarkan pendapatnya dan hak dilayani secara benar dan jujur. PLN harus taat Hukum dan berlaku profesional sebagai BUMN yang menjalankan pelayanan kepada bangsa dan negara. Kasihan Rakyat tatkala pemaksaan kewajiban setiap bulannya selalu diakali dengan perhitungan bisnis yang tidak tepat" tandas Politisi muda PKS ini.



# Aleg Fraksi DPR & DPRD Kota Temui Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Maluku

Penanganan psiko sosial dapat dipertimbangkan. Mereka merasa terbebani jauh dari keluarga. Beban makin berat ketika mereka berfikir tentang kebutuhan keluarga yang ditinggal di rumah

## SAADIAH ULUPUTTY, S.T

Anggota Fraksi PKS DPR RI Dapil Maluku

Ambon (16/06) — Anggota DPR RI Dapil Maluku, Saadiah Uluputty, menemui Ketua Gugus Tugas (Gustu) Penanganan Covid-19 Provinsi Maluku, Kasrul Selang, Senin (15/06/2020).

Kedatangan Anggota Legislatif Fraksi PKS tersebut sebagai tindak lanjut dari sidak yang dilakukan olehnya di Balai LPMP Poka yang menjadi lokasi karantina pasien Covid-19, Sabtu (13/06/2020).

Bersama Saadiah, dua Aleg Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal dan Rostina Hasyim ikut menyertai.

Sejumlah keluhan dan evaluasi atas penanganan

pasien yang terkarantina karena positif covid 19 disampaikan oleh tiga legislator PKS.

Kepada Sekda Maluku, Saadiah mengatakan, pasien Covid-19 yang dikarantina mengeluh dan merasakan kejenuhan karena jauh dari kerabat. Diantara para pasien, banyak yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga.

Maka menurutnya, Gugus tugas dapat membuat pola pendekatan dan penanganan psiko sosial agar pasien yang dikarantina tidak mengalami tekanan dan stress.

"Penanganan psiko sosial dapat dipertimbangkan. Mereka merasa terbebani jauh dari

keluarga. Beban makin berat ketika mereka berfikir tentang kebutuhan keluarga yang ditinggal di rumah," ungkap Saadiah.

Saadiah juga berharap agar perhatian Gugus tugas kepada pasien dapat diperkuat terutama menyangkut layanan pengobatan kepada para pasien.

"Proses karantina yang dilakukan dapat ditindaklanjuti dengan perhatian khusus untuk layanan pengobatan kepada para pasien. Termasuk fasilitasi dan penyediaan obat-obatan alternative yang pernah disebut oleh Pak Gubernur", harap Saadiah.

Saadiah mengingatkan, peningkatan dan penyediaan fasilitasi pengobatan bagi pasien dimaksud untuk memastikan para pasien dapat mengalami proses penyembuhan secara bertahap di tempat isolasi.

"Jika layanan kesehatan dan fasilitasi pengobatan diperoleh pasien yang dikarantina memadai, mereka dapat mengalami kesembuhan sebagaimana yang diharapkan",



tambahnya.

Dalam pertemuan dengan Ketua Gugus Tugas, Kasrul Selang, Saadiah juga menanyakan kemungkinan pasien yang diisolasi di LPMP melakukan karantina di rumah masing-masing. Tentunya proses karantina dengan menjaga protap penanganan Covid-19.

Menanggapi hal itu, Ketua Gustu, Kasrul Selang menyampaikan, kriteria pasien menjalani karantina di rumah harus memenuhi beberapa kriteria.

Sementara itu, Ketua Fraksi PKS DPRD Maluku, Turaya Samal meminta agar tim Gustu dapat memaksimalkan perhatian kepada Rumah Sakit (RS) Rujukan pemerintah daerah agar dapat menjalankan

perannya secara maksimal.

"Dukungan Pemda dapat sepenuhnya dilakukan pada RS yang menjadi rujukan untuk penanganan pasien covid. Karena trend penambahan pasien covid mengalami peningkatan signifikan. RS rujukan harus siap", kata Samal.

Sementara Anggota Komisi IV DPRD Maluku, Rostina Hasyim mendesak Pemda agar menjalankan program jaring pengaman sosial kepada keluarga pasien.

"Jaring pengaman sosial itu harus diutamakan bagi keluarga pasien juga. Sebagai pasien menjadi tulang punggung keluarga," kata Rostina.



الذین إذا أصابتهم مصيبة قالوا

إنا لله وإنا إليه راجعون



Keluarga besar Fraksi PKS DPR RI  
Turut berduka atas berpulangnya ke rahmatullah  
Anggota Fraksi PKS DPR Aceh

## SURYANI, S.Si, Apt

Wafat Pada Ahad 14 Juni 2020  
pukul 15.30 WIB Di Karang Baru,  
Aceh Tamiang.

Semoga Allah SWT menerima amal  
ibadahnya serta menempatkannya  
di tempat terbaik Jannah-Nya  
Amin



**Hj. Ledia Hanifa A, S.Si., M.Psi.T**  
Sekretaris Fraksi PKS DPR RI



# Fikri Faqih Sayangkan RUU Pendidikan Kedokteran Dibahas Baleg

“Anggota DPR umumnya fokus di Komisi bukan di Baleg. Ini akan mempengaruhi kinerja dan kualitas pembahasan. Meski demikian, jika rancangan undang-undang dari Badan Legislasi ini mendapatkan perhatian publik, barulah fraksi akan fokus untuk mem bahas nya.

## Dr. H. ABDUL FIKRI FAQIH, MM

Wakil Ketua Komisi X DPR RI

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyayangkan adanya undang-undang yang semakin marak diajukan dari Badan Legislasi (Baleg). Hal ini menanggapi adanya isu bahwa RUU Pendidikan Dokter sedang dibahas di Baleg tanpa sepengetahuan Komisi X.

“Anggota DPR umumnya fokus di Komisi bukan di Baleg. Ini akan mempengaruhi kinerja dan kualitas pembahasan” ujar Fikri Faqih saat menerima aspirasi dari Masyarakat Pemerhati Pendidikan Kedokteran dan Layanan Kesehatan (MPPKLLK), Selasa (16/6).

Meski demikian, jika

rancangan undang-undang dari Badan Legislasi ini mendapatkan perhatian publik, barulah fraksi akan fokus untuk mem bahas nya. Anggota Fraksi PKS DPR RI ini mencontohkan RUU Cipta Kerja dan RUU HIP yang kontroversial dan banyak ditolak publik.

“Seperti misalnya RUU Cipta Kerja, itu bukan dari Komisi. Begitupula dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang kontroversial itu.” jelas Fikri Faqih.

Terkait RUU Pendidikan Dokter sendiri, menurut Fikri Faqih, Fraksi PKS sudah menangkap dan memahami permasalahan yang muncul

ketika RUU ini disahkan. Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS di Badan Legislasi akan mengawal pembahasan RUU ini.

Menurut Prof. dr Ratna Sitompul dari MPPKLLK, RUU Pendidikan Kedokteran ini memiliki tiga masalah. Pertama, UU Pendidikan Dokter yang sebelumnya tidak dijalankan secara komprehensif sehingga urgensi revisi dan penggantian undang-undang baru sama sekali tidak urgen. Kedua, RUU ini menjadikan organisasi profesi kedokteran sebagai regulator pendidikan kedokteran. Ketiga, RUU ini dinilai menghambat kualitas pendidikan kedokteran.

“Kami mohon kepada Fraksi PKS untuk mendorong pemerintah mengambil peran dalam pendidikan kedokteran, seperti menciptakan ekosistem yang baik, menunda pembahasan RUU Pendidikan Dokter, serta mencegah monopoli organisasi profesi tertentu dalam menyelenggarakan pendidikan kedokteran” ujar Ratna Sitompul.



## PROFIL

## H. JOHAN ROSIHAN, S.T



**D**alam Program #Keluarga PKS pekan ini kita akan berkenalan dengan H. Johan Rosihan ST Anggota DPR RI FPKS dari daerah pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Barat (NTB) I atau pulau Sumbawa. Saat ini diamanahkan di Komisi IV yang membidangi Pertanian, Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kelautan.

Johan lahir pada tanggal 29 Oktober 1972 di Labuhan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa. Johan berkomitmen membangun tanah kelahirannya pulau terbesar di NTB tersebut. Secara khusus Johan memiliki tiga komitmen dalam memperjuangkan pulau Sumbawa di pentas nasional, yaitu berjuang meningkatkan eksistensi pulau Sumbawa di pentas nasional, memperjuangkan keadilan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat di Pulau Sumbawa, dan memastikan dukungan pusat terhadap petani, peternak dan nelayan bahkan lainnya di seluruh pulau Sumbawa.

Johan sejak remaja sudah aktif dalam organisasi dan sosial, selepas kuliah terasah dalam dunia politik hingga pada akhirnya mengenyam pengalaman panjang dari mulai tahun 2004 sebagai Anggota DPRD Provinsi tiga periode hingga akhirnya mentas di Senayan.

Menikah dengan Hj. Wahidah yang dinikahinya tanggal 28 Januari 2001. Dikarunia

lima anak yang sholeh dan sholehah. Berurutan yaitu Abdurrobil 'Alamien, Ar Ruhaniyatul Aliyah, Zakiyatun Nufus, Dzirwatul Muhihshoh dan Rifda Syakira. Meski berjauhan dan didera oleh fokus kesibukan masing-masing, namun Johan senantiasa membangun komunikasi yang intensif dengan keluarga. Mengoptimalkan fungsi keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama dalam mendidik, mengasuh, membina tumbuh kembang, menanamkan nilai-nilai religius dan moral

Pesan Johan untuk keluarga Indonesia "Keluarga

”  
 Keluarga adalah amanah, karenanya bersabarlah atasnya, hingga dia menjadi batu bata yang kuat untuk bangsa dan agamamu

adalah amanah, karenanya bersabarlah atasnya, hingga dia menjadi batu bata yang kuat untuk bangsa dan agamamu”

### SOCIAL MEDIA

Untuk mengetahui sepak terjang, H. Johan Rosihan, ST dapat mengikuti social media:

Facebook : Johan Rosihan  
 Twitter : @RosihanJohan  
 Instagram : @johanrosihan





Ketahui segala informasi  
terkini ikhtiar politik  
PKS di Parlemen

*Kunjungi*

**KANAL RESMI  
FRAKSI PKS  
DPR RI**

**fraksi.pks.id**



Website  
[fraksi.pks.id](http://fraksi.pks.id)



Instagram  
[fraksipksdpri](https://www.instagram.com/fraksipksdpri)



Twitter  
[@fraksipksdpri](https://twitter.com/fraksipksdpri)



Facebook  
Fraksi PKS DPR RI



Youtube  
PKSTV DPR RI

*You Stay At Home,  
We Stay At Parliament*

